

RANCANGAN AKHIR

RENCANA STRATEGIS

**DINAS PERIKANAN
KABUPATEN BENGKALIS
TAHUN 2025 - 2029**



**PEMERINTAH KABUPATEN BENGKALIS
DINAS PERIKANAN**

Alamat : Jalan Pertanian No. 04 Bengkalis
Kabupaten Bengkalis, Propinsi Riau

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah wa syukurillah semoga Allah subhanawataala yang telah memberikan rahmat dan hidayah-Nya sehingga kami dapat menyelesaikan Rancangan Akhir Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Perikanan Kabupaten Bengkalis Tahun Anggaran 2025 - 2029 dengan tepat waktu. Pada kesempatan ini, kami dari Tim Penyusun Rencana Strategis Dinas Perikanan Kabupaten Bengkalis mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah banyak membantu dalam Rencana Strategis Dinas Perikanan Kabupaten Bengkalis.

Rencana Strategis Dinas Perikanan Kabupaten Bengkalis merupakan dokumen perencanaan jangka menengah lima tahunan sesuai amanat dari Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah serta Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 90 tahun 2019, yang bersifat indikatif, memuat visi, misi, tujuan, sasaran strategis, kebijakan, program, kegiatan dan sub kegiatan pembangunan sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Perikanan, yang disusun dengan berpedoman kepada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bengkalis, dan dapat direviu sesuai aturan yang berlaku.

Demikian Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Perikanan ini disusun sesuai dengan Tugas dan Fungsi Dinas Perikanan Kabupaten Bengkalis Tahun Anggaran 2025 – 2029. Semoga Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Perikanan dapat direalisasikan dalam upaya pembangunan bidang Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bengkalis Tahun Anggaran 2025 - 2029.

Bengkalis, 22 September 2025

KEPALA DINAS PERIKANAN
KABUPATEN BENGKALIS.



MOHAMMAD AZMIR, S.Hut.T., M.Sc

Pembina TK. I

NIP. 19780613 199803 1 004

DAFTAR ISI

Isi	Halaman
KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI.....	ii
BAB I. PENDAHULUAN.....	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Landasan Hukum	2
1.3. Maksud dan Tujuan	4
1.4. Sistematika Penulisan.....	5
BAB II. GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH	7
2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi.....	7
2.2. Sumber Daya Perangkat Daerah.....	9
2.2.1. Sumber Daya Manusia	9
2.2.2. Sarana dan Prasarana	12
2.3. Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah.....	13
2.3.1. Capaian Kinerja Pelayanan	13
2.3.2. Capaian Kinerja Pendanaan	15
2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah.....	18
BAB III. PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH	24
3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah.....	24
3.2. Telaah Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	26
3.3. Telaah Renstra Kementerian/Lembaga dan Renstra Dinas Kelautan dan Perikanan Propinsi.....	29
3.4. Telaah RTRW dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis.....	31
3.5. Penentuan Isu-Isu Strategis	32

BAB IV. TUJUAN DAN SASARAN	34
BAB V. STRATEGI DAN ARAH KEBUJAKAN.....	38
BAB VI. RENCANA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN SERTA PENDANAAN	40
BAB VII. KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN	53
BAB VIII. PENUTUP	55
8.1. Kesimpulan	55
8.2. Kaidah Pelaksanaan	55

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Sebagai unsur perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kelautan dan perikanan, Dinas Perikanan Kabupaten Bengkalis memiliki komitmen terus-menerus melakukan perubahan paradigma pengelolaan perikanan Kabupaten Bengkalis.

Dalam rangka melaksanakan tugas dan wewenang dengan sebaik-baiknya maka perlu disusun dokumen perencanaan, baik jangka menengah maupun tahunan, yang disebut dengan Rencana Strategis (Renstra) dan Rencana Kerja (Renja). Dokumen perencanaan Perangkat Daerah (Renstra dan Renja) ini merupakan hasil *breakdown* dari dokumen perencanaan jangka menengah daerah (RPJMD) dokumen perencanaan tahunan daerah (RKPD).

Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun yang disusun untuk: (1) Menjamin adanya konsistensi perencanaan dan pemilihan program dan kegiatan prioritas sesuai dengan kebutuhan masyarakat; (2) menjamin komitmen terhadap kesepakatan program dan kegiatan yang dibahas secara partisipatif dengan melibatkan semua *stakeholders* pembangunan; dan (3) memperkuat landasan penentuan program dan kegiatan tahunan Organisasi Perangkat Daerah secara kronologis, sistematis, dan berkelanjutan.

Renstra berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu 5 (lima) tahun dengan memperhitungkan kekuatan, kelemahan, peluang, dan tantangan yang ada atau yang mungkin muncul. Renstra memuat tujuan, sasaran, strategi dan kebijakan yang realistis guna mengantisipasi perkembangan masa depan. Renstra memiliki fungsi sebagai pedoman dalam melakukan kontrol terhadap semua aktivitas baik yang sedang maupun yang akan datang, mengukur *outcome* (hasil) yang harus dicapai dan sebagai sarana untuk meminimalisir resiko, mengoptimalkan hasil yang akan dicapai dan sebagai alat untuk mengukur kemajuan pelaksanaan tugas dan fungsi yang diemban perangkat daerah.

Renstra Dinas Perikanan Kabupaten Bengkalis disusun sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Perikanan Kabupaten Bengkalis yaitu sebagai instansi yang bertanggungjawab dalam hal penyusunan, pelaksanaan dan pembinaan bidang perikanan.

Pendekatan yang digunakan dalam penyusunan Renstra Dinas Perikanan Kabupaten Bengkalis adalah: (1) pendekatan teknokratik yaitu menggunakan metode dan kerangka berpikir

ilmiah untuk mencapai tujuan dan sasaran pembangunan; dan (2) pendekatan partisipatif yaitu, melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan antara lain melalui forum perangkat daerah. Adapun tahapan dalam penyusunan Renstra-PD meliputi: (1) persiapan, (2) penyusunan rancangan awal, (3) penyusunan rancangan, (4) pelaksanaan forum perangkat daerah, (5) penyusunan rancangan akhir, dan (6) penetapan.

Renstra Dinas Perikanan Kabupaten Bengkalis harus memiliki keterkaitan dengan dokumen perencanaan lainnya terutama dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) karena RPJMD merupakan pedoman dalam penyusunan Renstra. Renstra Dinas Perikanan Kabupaten Bengkalis juga memiliki keterkaitan dengan Rencana Kerja (Renja) karena Renstra merupakan pedoman dalam perumusan Renja tahunan perangkat daerah.

1.2. Landasan Hukum

Landasan Hukum Dinas Perikanan Kabupaten Bengkalis dalam penyusunan Renstra Tahun 2025 - 2029 adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 228, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5941);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
13. Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 9 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah Provinsi Riau Tahun 2005 – 2025 (Lembaran Daerah Provinsi Riau Tahun 2009 Nomor 9);
14. Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 3 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah Provinsi Riau Tahun 2019 – 2024 (Lembaran Daerah Provinsi Riau Tahun 2019 Nomor 3);

15. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 03 Tahun 2007 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah Kabupaten Bengkalis Tahun 2005 – 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkalis Tahun 2007 Nomor 03);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 07 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 03 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bengkalis (Lembar Daerah Kabupaten Bengkalis Tahun 2019 Nomor 7);
17. Peraturan Bupati Bengkalis Nomor 84 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Esselonering, Tugas, Fungsi dan Uraian Tugas Serta Tata Kerja pada Dinas Perikanan Kabupaten Bengkalis (Lembar Daerah Kabupaten Bengkalis Tahun 2019 Nomor 84);
18. Peraturan Bupati Bengkalis Nomor 91 Tahun 2020 tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis pada Dinas Perikanan Kabupaten Bengkalis;
19. Peraturan Bupati Bengkalis Nomor 3 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bengkalis Tahun 2025-2029;

1.3. Maksud dan Tujuan

Penyusunan Renstra Dinas Perikanan dimaksudkan sebagai penjabaran RPJMD untuk memberikan arah dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi, serta sebagai pedoman strategis dan teknis bagi seluruh pemangku kepentingan (*stakeholder*) dalam pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan. Sedangkan tujuan penyusunan Renstra adalah:

1. Mengidentifikasi dan menganalisis keberhasilan pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Perikanan dalam pengelolaan urusan kelautan dan perikanan di Kabupaten Bengkalis;
2. Mengakomodir visi, misi, tujuan, sasaran dan program Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bengkalis sesuai dengan tugas, fungsi dan kewenangan Dinas Perikanan;
3. Memberikan gambaran kinerja pelayanan yang ingin dicapai dalam melaksanakan tugas dan fungsi Dinas Perikanan;
4. Memberikan fondasi yang baik bagi penyusunan Renja maupun pengendalian dan evaluasi kinerja Dinas Perikanan di masa mendatang;
5. Pedoman dalam penyusunan Renja tiap tahun.

1.4 Sistematika Penulisan

Sistematika Renstra Dinas Perikanan Kabupaten Bengkalis adalah sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN

Memuat tentang latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan serta sistematika penulisan Renstra.

BAB II : GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

Menguraikan tentang tugas, fungsi dan struktur organisasi, sumber daya perangkat daerah, kinerja pelayanan perangkat, serta tantangan dan peluang pengembangan pelayanan Dinas Perikanan Kabupaten Bengkalis dan Menguraikan tentang identifikasi permasalahan terkait tugas dan fungsi pelayanan Dinas Perikanan, telaah terhadap Visi, Misi dan Program Bupati dan Wakil Bupati terpilih, dan penentuan isu-isu strategis perangkat daerah.

BAB III : TUJUAN, SASARAN, STRATEGIS DAN ARAH KEBIJAKAN

Menjelaskan tentang tujuan yang hendak dicapai, indikator kinerja tujuan serta target kinerja tujuan; sasaran yang hendak dicapai, indikator kinerja sasaran serta target kinerja sasaran dan Menguraikan strategi dan arah kebijakan yang akan dijalankan dalam mencapai sasaran pelayanan perangkat daerah

BAB IV : PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Memuat rencana program dan kegiatan, indikator kinerja program dan kegiatan, target kinerja program dan kegiatan, pagu indikatif program dan kegiatan serta kelompok penerima manfaat dan Mengemukakan indikator kinerja perangkat daerah yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD.

BAB VI : PENUTUP

Menguraikan tentang kesimpulan atas penyusunan Renstra serta kaidah pelaksanaan Renstra, yaitu pelaksanaan, pengendalian dan evaluasi

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

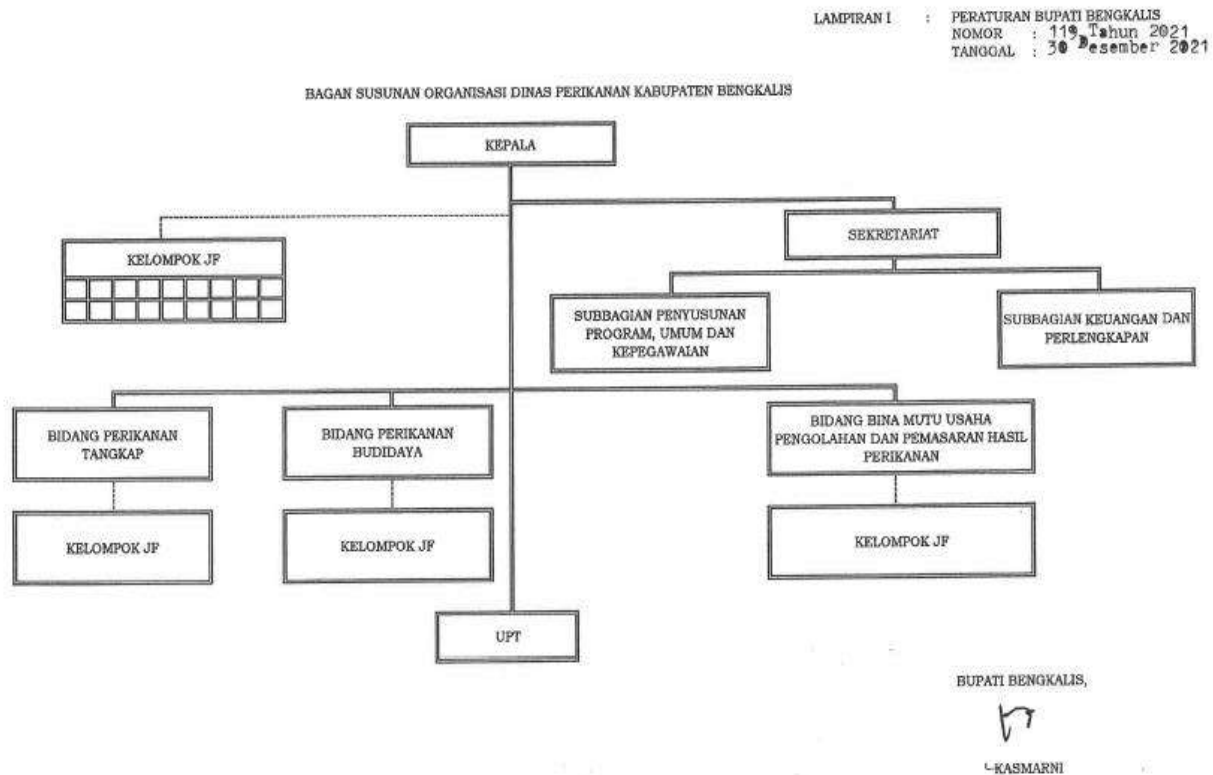
2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi

Dinas Perikanan Kabupaten Bengkalis yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 07 Tahun 2019, tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 3 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bengkalis, bertugas membantu Bupati menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kelautan dan perikanan. Selanjutnya Peraturan Bupati Bengkalis Nomor 119 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Dinas Perikanan. Dinas Perikanan Kabupaten Bengkalis dipimpin oleh Kepala Badan yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud diatas, Kepala Dinas Perikanan menyelenggarakan fungsi:

1. Penyelenggaraan perumusan bahan kebijakan menagenerial dan teknis dibidang sekretariat, dan bidang kelautan dan perikanan.
2. Penyelenggaraan koordinasi dan fasilitasi dibidang sekretariat, bidang perikanan tangkap, bidang perikanan budidaya, bidang bina mutu usaha pengolahan dan pemasaran hasil perikanan.
3. Penyelenggaraan pemantauan dan evaluasi dibidang sekretariat, bidang perikanan tangkap, bidang perikanan budidaya, bidang bina mutu usaha pengolahan dan pemasaran hasil perikanan.
4. Pembinaan dan penyuluhan kepada masyarakat nelayan/pembudidaya ikan.

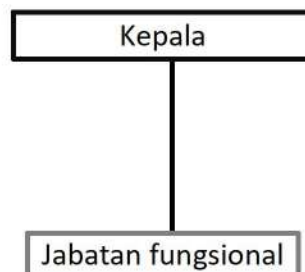
Struktur organisasi Dinas Perikanan Kabupaten Bengkalis berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 119 Tahun 2021 dapat dilihat pada gambar dibawah ini :

Gambar 2.1.
Struktur Organisasi Dinas Perikanan Kabupaten Bengkulu



Dalam rangka melaksanakan tugas teknis penunjang kegiatan tertentu, berdasarkan Peraturan Bupati Bengkulu nomor 119 tahun 2021, pada Dinas Perikanan Kabupaten Bengkulu dibentuk Unit Pelaksana Teknis yang tersebar di 6 (enam) Kecamatan. Adapun Struktur Organisasi UPT pada Dinas Perikanan Kabupaten Bengkulu seperti pada gambar 2.2. berikut :

Gambar 2.2. Struktur Organisasi UPT Dinas Perikanan Kabupaten Bengkulu



2.2 Sumber Daya Perangkat Daerah

Suatu organisasi dalam menjalankan tugas dan fungsinya sangat ditentukan oleh kualitas sumber daya manusia serta sarana dan prasarana pendukung. Sumber daya manusia dan perlengkapan tersebut merupakan elemen dalam menggerakkan roda organisasi, sekaligus sebagai faktor internal yang berpengaruh terhadap kemajuan suatu organisasi.

2.2.1 Sumber daya Manusia

Berdasarkan data per Desember 2025, jumlah pegawai pada Dinas Perikanan Kabupaten Bengkalis adalah 46 orang ASN dan Pegawai Non ASN sebanyak 66 orang yang terdiri dari tenaga teknis lapangan 28 orang, tenaga administrasi dan operator 18 orang, tenaga kebersihan 11 orang dan tenaga keamanan 9 orang . Apabila dirinci menurut jenis kelamin, golongan, eselonering dan pendidikan ASN pada Dinas Perikanan Kabupaten Bengkalis dapat dilihat sebagai berikut:

Tabel 2.1.

Komposisi ASN dan PPPK Dinas Perikanan Kabupaten Bengkalis
Berdasarkan Jenis Kelamin

No	Unit Kerja	Jenis Kelamin		Jumlah
		P	L	
1	Sekretariat	7	7	14
2	Bidang Perikanan Tangkap	4	5	9
3	Bidang Perikanan Budidaya	7	2	9
4	Bidang Bina Mutu Usaha Pengolahan Dan Pemasaran Hasil Perikanan	4	5	9
5	Unit Pelaksana Teknis	1	4	5
J u m l a h		23	23	46

Sumber : Sekretariat Dinas Perikanan 2025

Berdasarkan tabel di atas, dapat dilihat bahwa dari sejumlah 55 orang ASN dilingkungan Dinas Perikanan Kabupaten Bengkalis, 36 orang (65,46%) adalah perempuan dan 18 orang (32,73%) adalah laki-laki. Selain itu, juga diketahui bahwa sejumlah 45 orang ASN (81,82%) Dinas Perikanan Kabupaten Bengkalis bekerja pada Kantor Dinas Perikanan Kabupaten Bengkalis dan sisanya sejumlah 10 orang (18,18%) merupakan pegawai UPTD yang tersebar di 6 Kecamatan di wilayah Kabupaten Bengkalis. Komposisi pegawai pada bidang-bidang dilingkungan Dinas Perikanan Kabupaten Bengkalis sudah merata, sedangkan pada UPT disesuaikan dengan luas wilayah dan kondisi geografis masing-masing daerah.

Tabel 2.2.
 Komposisi ASN dan PPPK Dinas Perikanan Kabupaten Bengkalis
 Berdasarkan Golongan

No	Unit Kerja	Golongan				
		I	II	III	IV	PPPK
1	Sekretariat		4	8	2	
2	Bidang Perikanan Tangkap			7	1	1
3	Bidang Perikanan Budidaya			5	2	1
4	Bidang Bina Mutu Usaha Pengolahan Dan Pemasaran Hasil Perikanan			6	2	2
5	Unit Pelaksana Teknis			5		
J u m l a h			4	31	7	4

Sumber : Sekretariat Dinas Perikanan Kabupaten Bengkalis 2025

Berdasarkan tabel di atas, dapat dilihat bahwa ASN dilingkungan Dinas Perikanan Kabupaten Bengkalis sebagian besar adalah Golongan II dan III, yaitu mencapai 48 orang atau 87,27%, sedangkan Golongan IV hanya sejumlah 7 orang atau 12,73%. Kondisi ini mengakibatkan adanya pekerjaan yang seharusnya dilaksanakan oleh Golongan II tetapi dilaksanakan oleh pegawai Golongan III.

Tabel 2.3.
 Komposisi ASN Dinas Perikanan Kabupaten Bengkalis
 Berdasarkan Esselonering

No	Jabatan	Esselonering		
		II	III	IV
	Kepala Dinas	1		
	Sekretariat		1	
	Kepala Bidang		3	
	Kepala Sub Bagian			2
	Unit Pelaksana Teknis			5
J u m l a h				

Sumber : Sekretariat Dinas Perikanan Kabupaten Bengkalis 2025

Berdasarkan tabel di atas, dapat dilihat bahwa terdapat 22 jabatan dilingkungan Dinas Perikanan Kabupaten Bengkalis dan UPT. Dari jumlah tersebut 16 jabatan ada pada kantor Dinas Perikanan Kabupaten Bengkalis dan 6 jabatan ada di UPT.

Tabel 2.4.
Komposisi ASN dan PPPK Dinas Perikanan Kabupaten Bengkalis
Berdasarkan Pendidikan Formal

No	Pendidikan	Jumlah
1	Sekolah Dasar	-
2	Sekolah Menengah Pertama	-
3	Sekolah Menengah Atas	10
4	Diploma III	1
5	Sarjana	28
6	Magister	7
Total		46

Sumber : Sekretariat Dinas Perikanan Kabupaten Bengkalis 2025

Berdasarkan tabel di atas, dapat dilihat bahwa ASN dilingkungan Dinas Perikanan Kabupaten Bengkalis didominasi dengan tingkat pendidikan S1 yaitu sejumlah 28 orang atau sebesar 50,91%. Hal ini menunjukkan bahwa Dinas Perikanan Kabupaten Bengkalis tidak mengalami permasalahan di bidang pendidikan formal yang ditamatkan pegawainya. Namun demikian, tidak diperoleh data terkait dengan pendidikan non formal yang telah dipenuhi, sehingga tidak dapat diberikan gambaran keberadaan sumberdaya manusia dari sisi keahlian teknis maupun fungsional dilingkungan Dinas Perikanan Kabupaten Bengkalis.

2.2.2 Sarana dan Prasarana

Dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya, di samping ketersediaan sumber daya manusia yang sesuai kualitas dan kuantitas yang dibutuhkan, ketersediaan sarana dan prasarana juga menjadi syarat mutlak dalam menunjang, mendorong serta memfasilitasi kinerja untuk pencapaian target yang ditetapkan. Berikut ini rincian sarana dan prasarana yang dimiliki Dinas Perikanan Kabupaten Bengkalis :

Tabel 2.6.
 Sarana dan Prasarana Yang Dimiliki Dinas Perikanan Kabupaten Bengkalis
 Tahun 2025

NO	KODE	NAMA BARANG (BERDASARKAN BIDANG BARANG)	JUMLAH	HARGA (ribuan rupiah)
-1	-2	-3	-4	-5
	12	PEMERINTAH KABUPATEN / KOTA		
1	1.3.11	TANAH	5	462.557.200,00
2	1.3.2.1	ALAT BESAR	18	373.055.540,99
3	1.3.2.10	KOMPUTER	134	1.703.398.701,93
4	1.3.2.2	ALAT ANGKUTAN	66	3.933.279.906,00
5	1.3.2.3	ALAT BENGKEL DAN ALAT UKUR	43	232.652.983,00
6	1.3.2.4	ALAT PERTANIAN	50	686.587.363,80
7	1.3.2.5	ALAT KANTOR DAN RUMAH TANGGA	534	3.822.665.584,56
8	1.3.2.6	ALAT STUDIO, KOMUNIKASI DAN PEMANCAR	60	667.011.619,55
9	1.3.2.7	ALAT KEDOKTERAN DAN KESEHATAN	2	2.600.000,00
10	1.3.2.8	ALAT LABORATORIUM	80	794.573.024,92
11	1.3.2.9	ALAT PERSENJATAAN	3	30.195.000,00
12	1.3.3.1	BANGUNAN GEDUNG	41	20.769.858.525,58
13	1.3.3.2	MONUMEN	6	153.804.000,00
14	1.3.4.1	JALAN DAN JEMBATAN	14	5.386.293.125,00
15	1.3.4.2	BANGUNAN AIR	68	8.830.839.325,05
16	1.3.4.3	INSTALASI	13	610.855.088,89
17	1.3.4.4	JARINGAN	2	75.337.000,00
18	1.3.5.1	BAHAN PERPUSTAKAAN	6	70.576.000,00
19	1.3.3.1	ASET TIDAK BERWUJUD	1	39.800.000,00
JUMLAH			1.146	48.645.939.989,27

Tabel di atas menjelaskan jumlah asset yang dimiliki oleh Dinas Perikanan Kabupaten Bengkalis berupa tanah dan bangunan beserta kelengkapan dan peralatan kantor yang ada di kantor Dinas Perikanan Kabupaten Bengkalis dan seluruh Kantor UPT Dinas Perikanan Kabupaten Bengkalis. Berdasarkan tabel di atas, dapat dilihat terdapat total 1.146 asset dilingkungan Dinas Perikanan Kabupaten Bengkalis sampai dengan semester kedua tahun 2025 senilai 48.645.939.989,27 ribu rupiah.

2.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 mendefinisikan kinerja sebagai capaian keluaran/hasil/dampak dari kegiatan/program/sasaran sehubungan dengan penggunaan sumber daya pembangunan. Dalam perspektif Renstra-PD, kinerja dapat digambarkan sebagai tingkat pencapaian pelaksanaan suatu program/kegiatan dalam mewujudkan tujuan dan sasaran organisasi yang tertuang dalam rencana strategis.

Kinerja pelayanan perangkat daerah harus diinformasikan kepada masyarakat dan para pemangku kepentingan. Melalui informasi tersebut dapat diambil langkah-langkah atau tindakan koreksi yang diperlukan atas penetapan program/kegiatan dan sekaligus pada saat yang bersamaan dijadikan umpan balik sebagai bahan perencanaan periode berikutnya.

2.3.1. Capaian Kinerja Pelayanan

Sesuai dengan tugas dan fungsinya di bidang kelautan dan perikanan, Dinas Perikanan Kabupaten Bengkalis terus menerus melakukan peningkatan pelayanan serta kenyamanan dan kemudahan pelaku usaha di bidang perikanan baik itu nelayan, pembudidaya maupun pelaku pengolahan hasil perikanan dengan tujuan meningkatkan perekonomian pelaku usaha perikanan yang ada di Kabupaten Bengkalis.

Hal-hal strategis yang telah dilakukan dalam kurun waktu 5 (lima) tahun terakhir (Tahun 2021-2026) antara lain adalah sebagai berikut :

1. Pembangunan tambatan perahu, untuk mempermudah nelayan dalam melakukan bongkar muat hasil tangkapan dan tepat letak kapal nelayan;
2. Bantuan sarana penangkapan ikan untuk kelompok nelayan melalui Dana Alokasi Khusus;
3. Pelatihan, Penyuluhan dan Pembinaan dalam upaya untuk meningkatkan kualitas sumberdaya manusia sektor perikanan;
4. Salah satu sumber PAD dari sektor perikanan.

Untuk melihat tingkat capaian kinerja pelayanan Dinas Perikanan Kabupaten Bengkalis dilakukan perbandingan antara capaian kinerja pelayanan dengan kinerja yang dibutuhkan serta dampak yang ditimbulkan atas kinerja selama tahun 2021 – 2026.

Pada Tabel 2.7 disajikan pencapaian kinerja Dinas Perikanan Kabupaten Bengkalis 2022 – 2025. Secara umum, realisasi pencapaian sudah memenuhi setiap target yang diinginkan, bahkan terdapat beberapa indikator yang melebihi target yang diinginkan.

Tabel. 2.7.
Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Perikanan Kabupaten Bengkalis Tahun 2021 – 2025

NO	Indikator Kinerja	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun ke-					Realisasi Capaian Tahun ke-					Rasio Capaian Pada Tahun ke-				
					2021	2022	2023	2024	2025	2021	2022	2023	2024	2025	2021	2022	2023	2024	2025
1	Jumlah total produksi perikanan				6852	6762	6678	6591	6504	7735	9695	6034	11744	11517	112,89%	143,38%	90,35%	178,17%	177,06%
2	Pendapatan rata-rata Nelayan (Rp. ...)				39,6	41,6	43,5	45,6	47,8	45,14	47,2	106,2	92,81	86,9	113,98%	113,46%	244,11%	203,53%	181,79%
3	Angka Konsumsi Ikan (Kg/kapita/tahun)				39,6	41,87	42,11	42,94	43,2	39,59	42,15	47,72	47,41	47,41	99,97%	100,66%	113,32%	110,40%	109,74%
4	Predikat akuntabilitas kinerja perangkat daerah				B	BB	BB	BB	BB	BB	BB	BB	BB	BB	100%	100%	100%	100%	100%

Berdasarkan tabel di atas, dapat dilihat bahwa realisasi produksi perikanan cenderung mengalami kenaikan dimana pada tahun 2021 realisasi produksi perikanan mencapai target-target yang ditetapkan dalam Renstra Dinas Perikanan Kabupaten Bengkalis Tahun 2021 – 2025. Target produksi perikanan merupakan gabungan dari sektor perikanan tangkap dan perikanan budidaya. Secara umum target produksi perikanan setiap tahunnya telah tercapai terutama dari sektor perikanan tangkap. Pada tahun 2021 realisasi produksi perikanan tangkap sebesar 7171,44 ton dan pada tahun 2025 sebesar 5947,97 ton , hal ini disebabkan karena jumlah dan kualitas sarana dan prasarana penangkapan ikan yang dimiliki oleh nelayan mengalami penurunan serta kondisi alam sangat berpengaruh terhadap aktifitas penangkapan ikan. Sedangkan untuk perikanan budidaya terjadi peningkatan produksi pada tahun 2024 sebesar 965,26 ton dan tahun 2020 sebesar 1065,91 ton. Peningkatan produksi perikanan budidaya berasal dari komoditi udang vaname. Target konsumsi perikanan mengalami peningkatan setiap tahunnya, pada tahun 2025 angka konsumsi ikan sebesar 40,89 kg/kapita/tahun walaupun masih dibawah angka konsumsi ikan provinsi sebesar 43,47 kg/kapita/tahun. Sedangkan pendapatan rata-rata pertahun nelayan juga mengalami peningkatan setiap tahunnya.

2.3.2. Capaian Kinerja Pendanaan

Selain kinerja pencapaian target pelayanan sesuai dengan tugas dan fungsinya, juga perlu diukur pencapaian kinerja pendanaan. Capaian kinerja pendanaan didasarkan pada alokasi pagu dan realisasi anggaran Dinas Perikanan Kabupaten Bengkalis sejak tahun 2021 sampai dengan tahun 2025.

a. Belanja Tidak Langsung (BTL)

Realisasi Anggaran Belanja Tidak Langsung (Belanja Pegawai baik pembayaran Gaji dan Tunjangan serta Tambahan Penghasilan Pegawai) Tahun Anggaran 2016-2020 adalah sejumlah Rp. 35.020.020.343 (Tiga puluh lima milyar dua puluh juta dua puluh ribu tiga ratus empat puluh tiga rupiah) atau sebesar 95,09% dari dana yang tersedia dalam DPA yaitu sejumlah Rp. 36.830.171.794,00 (Tiga puluh enam milyar delapan ratus tiga puluh juta seratus tujuh belas ribu tujuh ratus Sembilan puluh empat rupiah). Rincian anggaran dan realisasi anggaran tersebut adalah sebagai berikut:

Tabel 2.8.

Realisasi Anggaran Belanja Tidak Langsung Pada Dinas Perikanan Kabupaten Bengkalis
Tahun Anggaran 2021 – 2025

NO	TAHUN	ANGGARAN	REALISASI	%
1	2021	9.000.000.000	8.338.323.691	92,65
2	2022	6.939.613.686	6.708.422.215	96,67
3	2023	6.151.077.250	5.837.795.636	94,91
4	2024	7.657.787.537	7.362.650.381	96,15
5	2025	7.081.693.321	6.772.828.420	95,64
JUMLAH		36.830.171.794	35.020.020.343	95,09

Dari data tersebut dapat dikatakan bahwa penyerapan dana anggaran Belanja Tidak Langsung sudah cukup optimal dengan predikat “tinggi”.

b. Belanja Langsung

Anggaran Belanja Langsung Dinas Perikanan dari tahun 2016-2020 sebesar Rp. 62.858.512.939,- (Enam puluh dua milyar delapan ratus lima puluh delapan juta lima ratus dua belas ribu Sembilan ratus tiga puluh Sembilan rupiah), sedangkan Belanja Langsung yang

dapat direalisasikan sebesar Rp. 52.961.802.144,- (Lima puluh dua milyar Sembilan ratus enam puluh satu juta delapan ratus dua ribu seratus empat puluh empat rupiah) atau 84,26%. Rincian realisasi anggaran Dinas Perikanan tahun 2016 – 2020 seperti pada tabel dibawah ini :

Tabel 2.9.

Realisasi Anggaran Belanja Langsung Dinas Perikanan Tahun Anggaran 2021 – 2024

No	Tahun	Anggaran	Realisasi	%
1	2021	23.240.195.187	15.775.790.128	67,88
2	2022	26.825.062.446	24.101.790.852	89,85
3	2023	20.805.936.792	19.410.795.319	93,29
4	2024	15.429.504.608	12.335.802.830	79,95
	Jumlah	86.300.699.033	71.624.179.129	82,74

Berdasarkan data tabel diatas, realisasi belanja langsung Dinas Perikanan sudah cukup baik dengan persentase realisasi belanja langsung paling rendah sebesar 67,88% pada tahun 2021 dan paling tinggi pada tahun 2023 sebesar 93,29%. Selain itu juga dapat dihitung persentase rata-rata anggaran yang direalisasikan sebesar 82,74% dalam kurun waktu dari tahun 2021 – 2024.

Sedangkan untuk rasio antara realisasi dan anggaran secara umum dari setiap program dapat dikatakan dalam kondisi baik, kecuali pada program-program yang mengalami pengurangan anggaran pada tahapan ABPD Perubahan sehingga menyebabkan rasio antara realisasi anggaran dengan pagu anggaran awal yang tersedia menjadi rendah.

Berikut ini disajikan tabel capaian kinerja anggaran Dinas Perikanan Kabupaten Bengkalis berdasarkan program Dinas tahun 2021 – 2024 :

Rancangan Akhir Renstra 2025-2029
Dinas Perikanan Kab. Bengkalis

Tabel 2.10

Capaian Kinerja Anggaran Dinas Perikanan Kabupaten Bengkalis Berdasarkan Program Dinas tahun 2021 – 2024

No	Sasaran	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Data Capaian pada Awal Tahun Perencanaan	Target Renstra Dinas Perikanan Kabupaten Bengkulu Tahun Ke-								Realisasi Capaian Dinas Perikanan Kabupaten Bengkulu Tahun Ke-								Rasio Capaian Dinas Perikanan Kabupaten Bengkulu Pada Tahun Ke-								Unit Penanggung Jawab									
					2021		2022		2023		2024		2021		2022		2023		2024		2021		2022		2023		2024											
1				5	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	22							
1	Meningkatnya kontribusi masyarakat terhadap perekonomian daerah	Program Penunjang Urusan Pemerintahan	Persentase pelaksanaan penunjang urusan	100	100	16.432.100.000	100	12.151.284.287	100	14.507.242.577	100	16.382.100.000	100	16.132.100.000	100	10.059.020.527	100	13.826.957.629	100	11.026.554.499	99,76	9.814.372.405	100,00	82,78	100,00	95,31	100,00	87,31	99,76	60,84	Dinas Perikanan							
2		Program Pengabdian Perikanan Tangkap	Persentase peningkatan produksi perikanan tangkap	85,83	100	4.935.000.020	85,83	3.619.285.110	87,82	2.885.000.012	89,51	4.935.000.014	92,83	4.935.000.016	85,83	2.852.850.733	87,82	4.575.366.341	89,51	3.428.638.733	92,83	993.038.425	100,00	78,82	100,00	170,40	100,00	89,48	100,00	20,12								
3		Program Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan	Persentase produksi perikanan kelompok nelayan dan budidaya	82,00	100	750.000.000	82,00	296.429.400	85,00	599.000.000	80,00	700.000.000	94,00	750.000.000	82,00	156.943.042	85,00	305.615.726	80,00	175.621.600	83,29	67.186.000	100,00	52,94	100,00	51,02	100,00	25,09	88,61	8,96								
4		Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan	Persentase tingkat konsumsi ikan	90,00	100	1.515.000.000	90,00	1.243.440.700	95,16	1.115.000.000	95,70	1.515.000.000	97,59	1.515.000.000	90,00	1.339.330.700	95,16	1.132.064.085	95,70	782.323.400	77,94	407.766.800	100,00	107,71	100,00	101,53	100,00	51,64	79,86	26,92								
5		Program Pengabdian Perikanan Budidaya	Persentase peningkatan produksi perikanan budidaya	82,50	100	5.330.000.020	82,50	3.309.175.100	83,33	4.550.800.012	80,00	5.330.000.014	95,88	5.330.000.016	82,50	2.449.957.406	83,33	4.261.787.071	80,00	3.997.656.087	82,26	1.090.140.650	100,00	74,04	100,00	93,65	100,00	75,00	85,79	20,45								
Rata-rata capaian kinerja (%)																							100,00	79,26	100,00	102,38	100,00	57,70	90,81	27,46								
Predikat Kinerja																							Sangat Tinggi	Tinggi	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi	Rendah	Tinggi	Sangat Rendah								
Faktor pendorong pencapaian kinerja : Peningkatan kualitas dan kuantitas (ASN dan stakeholder) serta peningkatan sarana dan prasarana																																						
Faktor penghambat pencapaian kinerja : Defisit keuangan daerah																																						
Usulan tindak lanjut pada Renja Dinas Perikanan kabupaten Bengkulu berikutnya :																																						
Usulan tindak lanjut pada Renstra Dinas Perikanan Kabupaten Bengkulus berikutnya :																																						

2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah

Rencana strategis disusun dengan berbagai tahapan, salah satu aspek penting dalam penyusunannya adalah identifikasi dan/atau klarifikasi faktor-faktor yang berasal dari lingkungan internal dan eksternal. Identifikasi faktor-faktor tersebut bertujuan untuk memetakan posisi dari Dinas Perikanan dalam menghadapi permasalahan pembangunan dan dalam rangka mencapai target dari pembangunan itu sendiri.

Faktor-faktor internal dan eksternal tersebut dideskripsikan melalui identifikasi kekuatan-kekuatan dan kelemahan-kelemahan yang dimiliki organisasi sebagai faktor lingkungan internal organisasi. Sedangkan untuk faktor di luar (eksternal) organisasi faktor dikelompokkan ke dalam peluang dan ancaman.

Dinas Perikanan memiliki tanggung jawab yang besar dalam memenuhi kebutuhan publik sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan sehingga Dinas Perikanan dihadapkan pada sejumlah persoalan yang membutuhkan penanganan secara serius dan komprehensif. Oleh karena itu secara kelembagaan Dinas Perikanan harus mampu memetakan berbagai faktor baik internal maupun eksternal berupa kekuatan, kelemahan, peluang, serta ancaman dalam rangka pengupayakan tercapainya tujuan yang telah ditetapkan.

Salah satu analisis yang dapat digunakan untuk melakukan identifikasi faktor internal dan eksternal adalah Analisis SWOT. Metode ini digunakan untuk menyusun strategi perusahaan atau organisasi yang bersifat satu unit bisnis tunggal. Ruang lingkup bisnis tunggal tersebut dapat berupa domestik maupun multinasional. SWOT adalah akronim dari Strength (kekuatan), Weakness (kelemahan), Opportunities (peluang) dan Threat (ancaman) lingkungan yang dihadapinya. Secara umum Analisis SWOT sudah dikenal oleh sebagian besar Tim Perencana Penyusunan Rencana Strategis

2.4.a. Identifikasi Faktor Internal

Identifikasi faktor internal dilakukan untuk mengetahui faktor-faktor yang menjadi kekuatan dan kelemahan. Kekuatan dapat menunjukkan kemampuan internal organisasi yang bersifat positif dan memungkinkan organisasi untuk memanfaatkannya untuk mencapai visi melalui misi yang ditetapkan. Adapun kelemahan menunjukkan situasi organisasi yang bersifat negatif yang dapat menghambat organisasi untuk mencapai visi dan misi yang telah ditetapkan. Identifikasi faktor internal meliputi empat pengelompokan sumberdayanya, yaitu : 1).

Sumberdaya manusia; 2). Sumberdaya Fisik; 3). Sumberdaya dana; dan 4). Sumberdaya teknologi. Adapun faktor kekuatan yaitu sebagai berikut :

1. Potensi sumberdaya kelautan dan perikanan
Kabupaten Bengkalis memiliki sumberdaya kelautan dan perikanan yang cukup besar meliputi hasil perikanan tangkap dan perikanan budidaya.
2. Komitmen kuat untuk mengelola sektor kelautan dan perikanan.
Komitmen ini dapat terlihat arah kebijakan kepala daerah yang tertuang dalam RPJMD Kabupaten Bengkalis dimana dalam rangka penguatan ekonomi dan nelayan, pemerintah kabupaten Bengkalis memberikan stimulus ekonomi, penyediaan sarana dan prasarana, pengembangan teknologi dan inovasi pendukung usaha pertanian dan perikanan..
3. Dukungan dana APBD
Alokasi anggaran untuk sub sektor kelautan dan perikanan tercerikan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah menggambarkan komitmen untuk pembangunan di sub sektor kelautan dan perikanan.
4. Kualitas SDM Aparatur yang memadai
Sumberdaya Manusia Aparatur pada Dinas Perikanan cukup memadai dimana dari Komposisi ASN pada Dinas Perikanan yang berpendidikan formal D3, S1 dan S2 sebanyak 37 orang atau 68,63%
5. Jumlah sarana dan prasarana yang cukup memadai menunjang kelancaran pekerjaan
Sarana dan prasarana yang menunjang pekerja ASN pada Dinas Perikanan dalam memberikan pelayanan dirasa cukup memadai dimana saat pada masing-masing bidang telah tersedia sarana dan prasarana yang dapat membantu ASN dalam memberikan pelayanan.
5. Ketersediaan UPT yang memadai
Dalam menjalankan pelayanan di bidang kelautan dan perikanan, Dinas Perikanan dibantu oleh beberapa UPT yang terkait dengan pembenihan ikan, pengembangan budidaya ikan dan pengelolaan penangkapan ikan.

Selain faktor kekuatan, dalam lingkungan internal organisasi Dinas Perikanan Kabupaten Bengkalis juga terdapat beberapa faktor yang menjadi kelemahan, yaitu;

1. Kuantitas / jumlah aparatur yang belum mencukupi

Jumlah ASN pada Dinas Perikanan yang tidak lama lagi akan memasuki usia pensiun sebanyak 10 orang atau 18% dan pada masing-masing seksi hanya mempunyai 1-2 orang staff yang membantu kepala seksi.

2. *Standar Operasional Prosedur (SOP)* untuk mendukung operasional organisasi belum tersedia.

Dinas Perikanan Kabupaten Bengkalis saat ini belum mempunyai Standar Operasional Prosedur (SOP) yang dapat digunakan dalam memberikan pelayanan seperti SOP Pemberian Hibah, SOP Pemberian Rekomendasi Izin dan lain sebagainya.

3. Tugas dan Fungsi tidak bersesuaian dengan Permendagri 90 Tahun 2019

Saat ini beberapa seksi pada Dinas Perikanan tidak dapat melaksanakan tugas dan fungsinya secara optimal, hal ini disebabkan tidak adanya cantolan kegiatan/subkegiatan pada Permendagri 90 Tahun 2019 yang dapat digunakan untuk menjalankan tugas dan fungsinya seksi secara optimal.

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

Dengan adanya Undang-undang 23 Tahun 2014, sebagian kewenangan untuk urusan kelautan dan perikanan sudah tidak menjadi milik kabupaten/kota seperti kewenangan pengelolaan ruang laut, sehingga hal ini membuat Dinas Perikanan Kabupaten Bengkalis tidak dapat lagi melakukan pengelolaan perikanan tangkap untuk perairan laut.

2.4.b. Identifikasi Faktor Eksternal

Identifikasi faktor eksternal dilakukan untuk mengetahui faktor-faktor yang menjadi peluang dan ancaman. Peluang dapat dimanfaatkan oleh organisasi secara positif untuk memaksimalkan strategi yang akan dilakukan. Sedangkan untuk ancaman, dalam konteks ini organisasi perlu mempertimbangkan setiap faktor yang berasal dari luar organisasi namun dapat mempengaruhi kinerja organisasi dalam mencapai visi dan misi yang telah ditetapkan. Identifikasi faktor eksternal meliputi berbagai aspek yang terdiri atas 1) ketersediaan sumberdaya perikanan, 2) pencemaran lingkungan, 3) kondisi nelayan, dan 4) perkembangan revolusi industri digital.

Adapun faktor peluang yaitu sebagai berikut :

1. Sektor kelautan dan perikanan merupakan salah satu prioritas dalam proses pembangunan baik di Nasional, Propinsi dan Kabupaten

Dukungan pemerintah pusat dan daerah dalam memajukan sektor kelautan dan perikanan tercermin dari terus digalakkannya Dukungan untuk mengedepankan arah dan kebijakan

pembangunan nasional yang meletakkan sektor kelautan sebagai prioritas melalui pemanfaatan dan pengelolaan sumberdaya kelautan dan perikanan dengan optimal dan lestari. Dalam hal ini, sektor kelautan dan perikanan mendukung ketahanan pangan, peningkatan daya saing dan nilai tambah, serta memelihara keberlanjutan pembangunan.

2. Peningkatan konsumsi produk perikanan

Pemerintah terus melakukan berbagai upaya dalam rangka meningkatkan konsumsi perikanan masyarakat Indonesia melalui berbagai program, seperti sosialisai gemar makan ikan, budidaya, dan penguatan teknologi.

3. Adanya pemanfaatan internet of things dalam mendukung pertumbuhan suatu sektor perekonomian

Peningkatan kualitas maupun kuantitas perikanan dan kelautan di Indonesia dapat tercapai salah satunya dengan memperkuat penggunaan teknologi berbasis internet. Internet of things (IoT) dapat mendukung industri perikanan sekaligus meningkatkan kapasitas nelayan dan pembudidaya ikan dalam meningkatkan hasil perikanan yang berdaya saing.

4. Potensi inovasi dan teknologi di bidang kelautan dan perikanan yang terus berkembang

Inovasi dan teknologi dalam sektor kelautan dan perikanan berperan penting dalam meningkatkan kuantitas dan kualitas hasil kelautan dan perikanan termasuk nilai tambahnya. Inovasi teknologi perikanan diharapkan dapat mendorong pada perbaikan pengelolaan dan pemanfaatan sumberdaya kelautan dan perikanan. Hal ini penting guna menjadikan kegiatan di sektor kelautan dan perikanan lebih efektif, efisien, ekonomis, berdaya saing tinggi, dan ramah lingkungan.

Adapun faktor tantangan yaitu sebagai berikut :

1. Perkembangan pasar global

Adanya pasar global seperti penerapan Asean Free Trade Agreement menjadi peluang untuk pengembangan produk perikanan sekaligus menjadi ancaman bagi produk perikanan di dalam negeri karena masuknya produk impor yang lebih bersaing dari segi harga dan kualitas.

2. Persoalan iklim dan lingkungan

Menurut Environmental Protection Agency (EPA) adalah perubahan iklim secara signifikan yang terjadi pada periode waktu tertentu. Dengan kata lain, perubahan iklim juga bisa diartikan sebagai perubahan suhu yang drastis, curah hujan, pola angin, dan lain sebagainya. Perubahan iklim dapat berdampak salah satunya bagi sektor kelautan dan perikanan. Selain

itu, juga terdapat degradasi dan pencemaran perairan yang menyebabkan penurunan produktivitas perikanan.

3. Eksploitasi Sumberdaya Perikanan dan IUU fishing (Illegal, Unreported, Unregulated)

Eksploitasi yang tinggi menyebabkan besarnya tekanan terhadap sumberdaya sehingga terjadi penurunan kualitas dan kuantitas Sumber daya Perikanan sehingga terjadi overfishing. Masih terjadi pelanggaran berupa IUU fishing (Illegal, Unreported, Unregulated) atau kegiatan penangkapan ikan secara ilegal, tidak dilaporkan, dan tidak mematuhi aturan

4. Keterbatasan Infrastruktur

Pembangunan infrastruktur merupakan salah satu aspek penting dan vital untuk mempercepat proses pembangunan nasional. Infrastruktur sektor kelautan dan perikanan di Kabupaten Bengkalis masih terbatas baik dari segi kualitas maupun kuantitas

2.4.c Matrik Analisis SWOT

Tabel 2.11 Matrik Analisis Swot

Faktor Internal Faktor Eksternal	Kekuatan (Strength) S	Kelemahan (Weakness)- W
	1. Potensi Sumberdaya kelautan dan perikanan. 2. Komitmen kuat untuk mengelola sektor kelautan dan perikanan. 3. Dukungan dana APBD. 4. Kualitas SDM Aparatur yang memadai. 5. Jumlah sarana dan prasarana yang mencukupi memadai menunjang pekerjaan. Ketersediaan UPT yang memadai.	1. Kuantitas / jumlah aparatur yang belum mencukupi. 2. Standar Operasional Prosedur (SOP) untuk mendukung operasional operasi belum tersedia. 3. Tugas dan fungsi tidak berkesuaian dengan permendagri 90 tahun 2019. 4. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
Peluang (Opportunities) – O	S + O	W + O
1. Sektor Kelautan dan Perikanan merupakan salah satu prioritas dalam proses pembangunan nasional, propinsi dan kabupaten. 2. Peningkatan Konsumsi Produk Perikanan. 3. Adanya pemanfaatn internet of things dalam mendukung pertumbuhan suatu sektor perekonomian. 4. Potensi inovasi dan teknologi dibidang kelautan	1. Pemanfaatan teknologi aplikasi berbasis internet dalam mendukung aktivitas pelayanan. 2. Penguatan kelembagaan berbasis masyarakat di sektor kelautan perikanan dari level desa, kecamatan dan kabupaten dengan melibat semua stakeholder terkait.	1. Pengajuan penambahan ASN untuk menggantikan ASN yang pensiun. 2. Menjaring mitra dan meningkatkan kerjasama dalam pemanfaatan teknologi dibidang kelautan dan perikanan.

dan perikanan yang terus berkembang.		
Tantangan (Threats) – T	S + T	W + T
1. Perkembangan Pasar Global. 2. Persoalan iklim dan lingkungan. 3. Eksploitasi Sumberdaya Perikanan dan IUU Fishing. 4. Keterbatasan Infrastruktur.	1. Meningkatkan kegiatan pendampingan dan penyuluhan bagi nelayan dan pembudidaya ikan dalam meningkatkan kapasitas nelayan dan pembudidaya ikan 2. Berkoordinasi dengan instansi terkait dalam rangka peningkatan infrastruktu.	1. Berkoordinasi dengan Pemerintah Propinsi dan pusat dalam rangka penegakan kepastian hukum yang jelas dalam mengatasi persoalan IUU Fishing. 2. Membangun kerjasama dengan berbagai pihak termasuk swasta dalam mendukung pengembangan teknologi tepat guna dan penguatan modal dalam sektor kelautan dan perikanan

Permasalahan Dan Isu-Isu Strategis Perangkat Daerah

Dalam perumusan kebijakan publik, hal penting yang harus dilakukan terlebih dahulu adalah identifikasi permasalahan kebijakan (policy problem) sebagai salah satu tahap dalam perumusan isu strategis daerah. Suatu analisis permasalahan pembangunan harus menemukan permasalahan utama yang dihadapi oleh daerah dengan pendalaman akar masing-masing masalah. Adapun dinamika lingkungan eksternal yang kemungkinan besar terjadi di masa datang, baik yang memberi peluang atau sebaliknya berdampak ancaman bagi masyarakat, harus dikenali dengan baik sebagai bagian dari identifikasi isu-isu strategis pembangunan daerah.

Permasalahan pembangunan daerah merupakan “gap expectation” antara kinerja pembangunan yang dicapai saat ini dengan yang direncanakan serta antara apa yang ingin dicapai dimasa datang dengan kondisi riil saat ini. Potensi permasalahan pembangunan daerah pada umumnya timbul dari kekuatan yang belum didayagunakan secara optimal, kelemahan yang tidak diatasi, peluang yang tidak dimanfaatkan serta ancaman yang tidak diantisipasi.

Isu-isu strategis baik berskala regional, provinsi, nasional, maupun internasional harus dianalisis untuk mendapatkan kerangka kebijakan atas peluang apa yang harus dimanfaatkan dan ancaman apa yang harus diantisipasi. Rumusan kebijakan inilah yang akan menjadi prioritas pembangunan dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah

Berdasarkan analisis terhadap tugas dan fungsi serta kinerja dimasa lalu, dapat dirumuskan permasalahan utama Dinas Perikanan Kabupaten Bengkalis adalah “**menurunnya produksi perikanan Kabupaten Bengkalis**”. Permasalahan tersebut dapat dianalisis melalui pendekatan akar masalah seperti dapat dilihat pada tabel III.1

Tabel III.1
Pemetaan Masalah Pada Dinas Perikanan

No	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
1	Menurunnya Prooduksi Perikanan	Menurunnya Hasil Tangkan Nelayan dan Panen Pembudidaya Ikan	1. Belum Memadainya Sarana dan Prasarana Perikanan Tangkap dan Budidaya 2. Rendahnya Kualitas dan Kuantitas Nelayan dan Pembudidaya Ikan

Tabel III.2
Identifikasi Permasalahan untuk Penentuan Program Prioritas

No	Bidang Urusan dan Indikator Kinerja Penyelenggaraan Daerah	Interpretasi Belum Tercapai (<) Sesuai (=) Melampaui (>)	Permasalahan	Faktor-Faktor Penentu Keberhasilan
1	Urusan Kelautan dan Perikanan			
1.1	Produksi Perikanan Tangkap	<	- Iklim lingkungan - Sarana dan prasarana yang kurang memadai - Masih rendahnya kapasitas nelayan	- Penggunaan teknologi tepat guna - Jumlah sarana dan prasarana memadai - Nelayan dikabupaten Bengkalis memiliki kapasitas yang mumpuni
1.2	Produksi Perikanan Budidaya	<	- Iklim Lingkungan - Hama Penyakit Ikan dan virus - Sarana dan prasarana kurang memadai - Masih rendahnya kapasitas pembudidaya ikan	- Penggunaan teknologi tepat guna - Pemeriksaan rutin terhadap lingkungan budidaya - Jumlah sarana dan prasarana memadai - Pembudidaya Ikan dikabupaten Bengkalis memiliki kapasitas yang mumpuni
1.3	Pendapatan rata-rata pertahun nelayan	>	-	- Harga ikan yang tinggi
1.4	Tingkat Konsumsi Ikan	>	-	- Sosialisasi gerakan makan ikan - Diversifikasi olahan hasil perikanan

3.2. Telaah Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah

Salah satu hal terpenting dalam rumusan kebijakan pembangunan adalah kejelasan mengenai apa yang akan diwujudkan dalam 5 (lima) tahun mendatang berdasarkan analisis kinerja pembangunan saat ini, serta permasalahan dan isu strategis pembangunan daerah yang akan ditangani selama 5 (lima) tahun ke depan. Impact pembangunan sebagai salah satu komponen penting arsitektur kinerja merupakan indikator tertinggi (high level indicators) yang akan dicapai dan menjadi tolok ukur keberhasilan pembangunan di masa mendatang.

Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan. Visi menjadi fokus dan arahan pembangunan serta program kerja selama lima tahun pelaksanaan kepemimpinan kepala daerah. Visi menjadi penting karena akan menyatukan dan mengintegrasikan setiap aspek pendukung pembangunan daerah yang akan dilaksanakan oleh seluruh elemen, baik aparatur pemerintahan, masyarakat, maupun swasta. Visi RPJMD Kabupaten Bengkalis Tahun 2021-2026 adalah **"Terwujudnya Kabupaten Bengkalis yang bermarwah, Maju dan Sejahtera"**.

Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan dan diwujudkan agar sasaran pembangunan dapat terlaksana dan berhasil dengan baik sesuai dengan visi yang telah ditetapkan. Misi RPJMD Kabupaten Bengkalis 2021-2026 adalah sebagai berikut :

1. Mewujudkan Pengelolaan Potensi Keuangan Daerah, Sumber Daya Alam dan Sumber Daya Manusia yang Efektif dalam memajukan Perekonomian;
2. Mewujudkan Reformasi Birokrasi serta Penguatan Nilai-nilai Agama dan Budaya Melayu menuju Tata Kelola Pemerintahan yang baik dan masyarakat yang berkarakter;
3. Mewujudkan Penyediaan Infrastruktur yang berkualitas dan Mengembangkan Potensi Wilayah Perbatasan untuk Kesejahteraan Masyarakat.

Dari rumusan visi dan misi tersebut, dapat diidentifikasi keterkaitannya dengan tugas dan fungsi Dinas Perikanan, yaitu **"MISI I Mewujudkan Pengelolaan Potensi Keuangan Daerah, Sumber Daya Alam dan Sumber Daya Manusia yang Efektif dalam Memajukan Perekonomian"**.

Sesuai dengan misi tersebut maka tujuan yang akan dicapai sebagai tugas Dinas Perikanan Kabupaten Bengkalis dalam RPJMD periode 2021 – 2026 sebagai OPD yang

melaksanakan bidang perikanan adalah "**Penguatan ekonomi petani dan nelayan**" dengan sasaran sebagai berikut :

1. Meningkatnya Produksi Perikanan;
2. Meningkatnya tingkat konsumsi ikan;
3. Pendapatan rata-rata nelayan;
4. Meningkatnya Cakupan binaan kelompok nelayan;
5. Meningkatnya produksi perikanan kelompok nelayan.

Tujuan dan sasaran tersebut menjadi pedoman Dinas Perikanan Kabupaten Bengkalis dalam penyusunan Renstra Dinas Perikanan periode 2021-2026 agar arah kebijakan dan program pembangunan daerah dalam RPJMD Kabupaten Bengkalis periode 2021-2026 sinkron dan terintegrasi dengan arah dan kebijakan serta program dan kegiatan dalam Renstra Dinas Perikanan Kabupaten Bengkalis.

Tabel III.3
 Visi, Misi, Tujuan, Sasaran dan Indikator RPJMD
 Sesuai Tugas Fungsi Dinas Perikanan Kabupaten Bengkalis

No	Visi/Misi/Program Kerja Kepala Daerah	Tugas dan Fungsi Dinas Perikanan	Permasalahan	Faktor Penghambat dan Pendorong
	Visi : Terwujudnya Kabupaten Bengkalis yang bermarwah, Maju dan Sejahtera Misi : 1. Mewujudkan Pengelolaan Potensi Keuangan Daerah, Sumber Daya Alam dan Sumber Daya Manusia yang Efektif dalam Memajukan Perekonomian Tujuan : 1.1 Memperkokoh perekonomian daerah dan masyarakat melalui pengelolaan sumberdaya alam, potensi pesisir dan kemaritiman Sasaran : 1.1.1 Meningkatnya kontribusi Non Migas terhadap Perekonomian Daerah Indikator : Pertumbuhan Agregat Sektoral di luar migas 1.1.2 Terwujudnya pemulihan ekonomi daerah dan reformasi sosial pasca pandemi Indikator : Pendapatan Perkapita Penduduk (Juta Rp./Kapita/Tahun)	Tugas : Membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan dibidang perikanan Fungsi : a. Pelaksanaan kebijakan pemberdayaan nelayan kecil dan usaha kecil pembudidayaan ikan, penerbitan SIUP dibidang pembudidayaan ikan yang usahanya dalam satu daerah kabupaten, pengelolaan dan penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan dan pengelolaan pembudidayaan ikan ; b. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pemberdayaan nelayan kecil dan usaha kecil pembudidayaan ikan yang usahanya dalam 1 (satu) daerah kabupaten, pengelolaan dan penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI) dan pengelolaan pembudidayaan ikan. c. Pelaksanaan administrasi Dinas Perikanan d. Pelaksanaan fungsi lain yang terkait bidang perikanan yang diberikannya bupati	1. Menurunya hasil tangkapan nelayan dan panen pembudidaya ikan	Faktor Penghambat : 1. Rendahnya kualitas SDM Nelayan dan Pembudidaya Ikan 2. Kurangnya akses permodalan 3. Terbatasnya sarana dan prasarana pendukung 4. Kurangnya penerapan teknologi Faktor Pendorong : 1. Kualitas SDM aparatur yang memadai dalam pembinaan pelaku usaha perikanan. 2. Potensi pengembangan perikanan budidaya (lahan) 3. Dukungan APBD

3.3. Telaah Renstra Kementerian/Lembaga dan Renstra Dinas Kelautan dan Perikanan Propinsi

Pada dasarnya, tujuan, sasaran, dan indikator kinerja perencanaan pembangunan yang ditetapkan baik di tingkat pusat, provinsi, maupun kabupaten/ kota untuk 5 (lima) tahun ke depan memiliki keselarasan yang kokoh. Hal ini mengindikasikan harapan dalam menumbuhkembangkan sinergitas perencanaan yaitu meningkatkan daya saing pelayanan umum dan kesejahteraan masyarakat guna mewujudkan tujuan pembangunan daerah dan nasional. Dalam kerangka sinergi tersebut, penyusunan Renstra Dinas Perikanan Kabupaten Bengkalis perlu menelaah Renstra Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Riau serta Renstra Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia.

Visi Kementerian Kelautan dan Perikanan dalam Rencana Strategis Tahun 2020-2024 adalah “Terwujudnya Masyarakat Kelautan dan Perikanan yang Sejahtera dan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan yang Berkelanjutan untuk mewujudkan Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong”. Visi tersebut dijabarkan kepada misi dan selanjutnya ditetapkan pula tujuan dan sasaran strategis.

Adapun Tujuan pembangunan Kementerian Kelautan dan Perikanan meliputi :

1. Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan dan Pengembangan Inovasi dan Riset Kelautan dan Perikanan, dengan tujuan:
 - a. meningkatnya kapasitas dan kompetensi SDM kelautan dan perikanan; dan
 - b. menguatnya inovasi dan riset kelautan dan perikanan.
2. Peningkatan Kontribusi Ekonomi Sektor Kelautan dan Perikanan terhadap Perekonomian Nasional”, dengan tujuan:
 - a. optimasi pengelolaan sumber daya perikanan budidaya dan perikanan tangkap;
 - b. meningkatnya mutu, daya saing, dan penguatan sistem logistik hasil kelautan dan perikanan;
 - c. meningkatnya pengawasan pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan;
 - d. meningkatnya sistem perkarantina ikan, pengendalian mutu, keamanan hasil perikanan, dan keamanan hayati ikan; dan
 - e. optimalnya pengelolaan ruang laut
3. Peningkatan Kelestarian Sumber Daya Kelautan dan Perikanan, dengan tujuan optimalnya konservasi dan pengelolaan kerusakan pesisir dan pulau-pulau kecil

4. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan di KKP, dengan tujuan meningkatnya kinerja Reformasi Birokrasi KKP.

Sasaran Strategis (SS) KKP tahun 2020-2024, terdiri dari:

SS-1 Kesejahteraan masyarakat kelautan dan perikanan meningkat;

SS-2 Ekonomi sektor kelautan dan perikanan meningkat; dengan indikator kinerja:

1. Pertumbuhan Produk Domestik Bruto (PDB) Perikanan;
2. Nilai ekspor hasil perikanan, dan
3. Konsumsi ikan.

SS-3 Sumber daya kelautan dan perikanan berkelanjutan;

SS-4 Kapasitas dan kompetensi SDM kelautan dan perikanan meningkat; dengan indikator kinerja :

1. Persentase serapan lulusan pendidikan dan pelatihan pada Dunia Usaha dan Dunia Industri (DUDI); dan
2. Kelompok pelaku utama/usaha yang ditingkatkan kelasnya.

SS-5 Hasil riset dan inovasi dimanfaatkan;

SS-6 Tata kelola sumber daya kelautan dan perikanan bertanggung jawab;

SS-7 Industrialisasi kelautan dan perikanan berdaya saing; dengan indikator kinerja:

1. Produksi perikanan;
2. Produksi garam nasional;
3. Dana yang disalurkan untuk pelaku usaha kelautan dan perikanan skala kecil;
4. Kawasan kluster sentra produksi perikanan budidaya unggulan.

SS-8 Pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan integratif;

SS-9 Tata kelola pemerintahan yang baik.

Sedangkan tujuan pembangunan kelautan dan perikanan dari RENSTRA Dinas Kelautan dan Perikanan Propinsi Riau adalah "**Meningkatkan Kesejahteraan masyarakat pelaku perikanan**", dengan sasaran yang ingin dicapai antara lain :

1. Meningkatnya Produksi Perikanan, dengan indikator kinerja : Jumlah Produksi Perikanan;
2. Menurunnya IUU Fishing;
3. Meningkatnya Kualitas Pelayanan Internal OPD.

Berdasarkan Tujuan dan sasaran tersebut di atas, ditemukan keterkaitannya dengan Renstra Dinas Perikanan Kabupaten Bengkalis yaitu **meningkatkan produksi perikanan**.

Dengan demikian pencapaian tujuan dan sasaran Renstra Dinas Perikanan Kabupaten Bengkalis juga berimplikasi terhadap pencapaian tujuan dan sasaran Renstra Kementerian Kelautan dan Perikanan serta Dinas Kelautan dan Perikanan Propinsi Riau.

3.4. Telaah RTRW dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Sesuai rancangan Rencana Tata Ruang (RTRW) yang tertuang dalam Perda Kabupaten Bengkalis Nomor Tahun 2021 tentang Rencana Tata Ruang wilayah Kabupaten Bengkalis Tahun 2021-2041, Rencana pola ruang Kawasan Peruntukan Budidaya (KPB) Kabupaten Bengkalis adalah seluas 768.135,88 Ha atau 88,68% dari luas Kabupaten Bengkalis. Kawasan Hutan Produksi Tetap (HP) memiliki luas terbesar pada KPB yaitu 345.298 Ha atau 39,86% dari total luas wilayah kabupaten, sedangkan Kawasan Tanaman Pangan memiliki luas terkecil yaitu 2.071 Ha.

Pada kawasan peruntukan budidaya, kondisi JE (Jasa Ekosistem) berstatus sedang dominan diseluruh kedalaman gambut. Artinya, kegiatan manusia sudah merata pada semua pola ruang dengan tidak memperhatikan dampak kedalaman gambut terhadap usaha mereka dan lingkungannya. Kegiatan budidaya manusia yang memberikan dampak besar terhadap lingkungan seperti kegiatan di kawasan hutan, kawasan perkebunan, dan kawasan permukiman.

Kawasan Budidaya merupakan suatu wilayah yang ditetapkan dengan fungsi utama untuk dibudidayakan atas dasar kondisi dan potensi sumber daya alam, sumber daya manusia, dan sumber daya buatan (PermenPU No. 41/2007). Kabupaten Bengkalis memiliki kawasan budidaya (Luas daratan Kawasan Peruntukan Budidaya sebesar 768.135,9 ha atau 88,68% dari luasan keseluruhannya. Rencana Pola Ruang Kawasan Budidaya berdasarkan Ranperda Kabupaten Bengkalis untuk sektor perikanan budidaya seluas 2.234,09 ha atau 0,29% dari Kawasan Peruntukan Budidaya (KPB) Kabupaten Bengkalis.

Dengan Kawasan yang direkomendasikan untuk Perikanan Budidaya adalah sebagai berikut sekitar 2.008 ha. Hal ini mengindikasikan terjadi peningkatan luasan perikanan budidaya yang cukup besar dari kondisi eksisting seluas 256,6 ha menjadi 2.008 ha. TORA berupa Lahan garapan berupa sawah dan tambak rakyat direkomendasikan sebagai lahan untuk Kawasan tanaman pangan berupa sawah. Pertimbangannya adalah kebutuhan karbohidrat bagi Kabupaten Bengkalis terbatas apabila dalam kondisi darurat, namun ketersediaan protein hewani dari perikanan dapat disuplai dari perairan tangkap di sungai, pantai dan laut.

3.5. Penentuan Isu-isu Strategis

Berdasarkan hasil telaah terhadap permasalahan dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi perangkat daerah, kebijakan nasional, berbagai permasalahan pembangunan bidang kelautan dan perikanan yang dihadapi, tantangan dan potensi yang dapat dikembangkan mendasari perumusan isu strategis pembangunan bidang kelautan dan perikanan. Perumusan dilaksanakan dengan mempertimbangkan faktor-faktor yang mempengaruhi permasalahan pelayanan Dinas Perikanan Kabupaten Bengkalis ditinjau dari gambaran pelayanan, visi misi dan program kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih, sasaran jangka menengah pada Renstra Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), sasaran jangka menengah dari Renstra Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi, implikasi RTRW dan KLHS bagi pelayanan Dinas Perikanan Kabupaten Bengkalis. Adapun isu strategis tersebut adalah sebagai berikut :

1. Masih rendahnya SDM pelaku usaha Perikanan;
2. Belum memadainya sarana dan prasarana pelaku usaha perikanan;
3. Masih rendahnya efektifitas kelembagaan pelaku usaha perikanan;

Tabel III.4
 Perumusan Isu Strategis Dinas Perikanan

No	Tujuan	No. Isu	Isu Strategis	Deskripsi Permasalahan
1.	Penguatan Ekonomi Petani dan Nelayan	1.	Turunnya produksi perikanan	- Menurunnya jumlah hasil tangkapan nelayan dan panen pembudidaya ikan.
		2.	Rendahnya kualitas SDM Pelaku Usaha Perikanan	- Nelayan di Kabupaten Bengkalis masih menggunakan sistem penangkapan ikan secara tradisional - Pembudidaya ikan masih menggunakan sistim budidaya sederhana dan semi insentif
		3.	Rendahnya efektifitas kelembagaan pelaku usaha perikanan	- Saat ini banyak kelompok usaha perikanan di Kabupaten Bengkalis belum menerapkan kelembagaan yang kuat dimana pembentukan kelompok hanya bersifat sementara.

Untuk memperkuat peran dan kewenangan tersebut secara efektif, Dinas Perikanan Kabupaten Bengkalis terus melakukan perbaikan, yang menyangkut peran dan tugas pokok dan fungsinya. Di samping itu, kondisi lingkungan strategis dengan dinamika perubahan yang sangat cepat, menuntut Dinas Perikanan Kabupaten Bengkalis dapat dan mampu beradaptasi dalam pelaksanaan peran-perannya secara tepat dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Dengan etos tersebut, diharapkan mampu menjadi katalisator dalam proses pencapaian tujuan pembangunan kelautan dan perikanan nasional.

BAB III

TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

3.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Perikanan Kabupaten Bengkalis

Tujuan adalah sesuatu kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu tertentu tentang hal-hal yang perlu dilakukan untuk mencapai visi, melaksanakan misi, memecahkan permasalahan, dan menangani isu strategis daerah yang dihadapi. Sedangkan sasaran adalah rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan, berupa hasil pembangunan Daerah/Perangkat Daerah yang diperoleh dari pencapaian hasil (outcome) program Perangkat Daerah.

Berdasarkan permasalahan dan isu-isu strategis yang telah diidentifikasi maka Dinas Perikanan Kabupaten Bengkalis dalam lima tahun ke depan akan menjalankan segenap penyelenggaraan urusan perikanan dengan tujuan yaitu “penguatan ekonomi petani dan nelayan”.

Dalam rangka pencapaian tujuan tersebut, dirumuskan 7 (tujuh) sasaran sebagai wujud penyelenggaraan urusan, yakni :

1. Meningkatnya nilai tambah Kontribusi Ekonomi dari Sumber Daya Laut :
 - 1.1. Indeks Ekonomi Biru Indonesia (IBEI).
2. Meningkatnya jumlah produksi perikanan :
 - 2.1. Jumlah produksi perikanan (ton/tahun);
3. Meningkatnya tingkat konsumsi ikan
 - 3.1. Angka konsumsi ikan (kg/kapita/tahun).
4. Meningkatnya produksi olahan perikanan :
 - 4.1. Jumlah produksi olahan perikanan (ton).
5. Meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah.
 - 5.1. Predikat akuntabilitas kinerja perangkat daerah
6. Terwujudnya Pencegahan Korupsi pada Perangkat Daerah
 - 6.1. Persentase Partisipasi ASN dalam Survei Penilaian Integritas (SPI) internal Perangkat Daerah.
7. Meningkatnya Pengelolaan Manajemen Risiko Perangkat Daerah
 - 7.1. Jumlah Peta Risiko Perangkat Daerah

Penanggung jawab indikator Cakupan binaan kelompok pelaku usaha perikanan adalah bidang Pemberdayaan Perikanan pada Dinas Perikanan Kabupaten Bengkalis.

Tujuan dan sasaran Renstra Dinas Perikanan Kabupaten Bengkalis Tahun 2025-2029 serta rincian capaian setiap tahundapat dilihat pada Tabel.4.1. Sedangkan dalam Rancangan RPJMD Kabupaten Bengkalis Tahun 2025-2029 indikator kinerja pembangunan daerah untuk layanan urusan pilihan Kelautan dan Perikanan yang menjadi tanggungjawab kinerja Dinas Perikanan Kabupaten Bengkalis adalah Jumlah produksi perikanan dan pendapatan rata-rata nelayan.

Tabel 3.1

Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Dinas Perikanan Kabupaten Bengkalis Tahun 2025-2029

No	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	TARGET KINERJA PADA TAHUN					
					2025	2026	2027	2028	2029	2030
1	Penguatan Ekonomi Petani dan Nelayan	Kontribusi PDRB Sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	Meningkatkan jumlah produksi perikanan	Jumlah produksi perikanan (ton/tahun)	9128	11578	12808	14028	16478	17468
			Meningkatkan tingkat konsumsi ikan	Angka konsumsi ikan (kg/kapita/tahun)	43,2	43,46	43,72	43,96	44,24	44,5
			Meningkatkan produksi olahan perikanan	Jumlah produksi olahan perikanan (ton)	100	100	100	100	100	100
			Meningkatkan akuntabilitas kinerja perangkat daerah	Predikat akuntabilitas kinerja perangkat daerah	73	74	75	76	77	78
			Terwujudnya Pencegahan Korupsi pada Perangkat	Persentase Partisipasi ASN dalam Survei Penilaian Integritas	100	100	100	100	100	100

		Daerah	(SPI) internal Perangkat Daerah						
		Meningkatn ya Pengelolaan Manajemen Risiko Perangkat Daerah	Jumlah Peta Risiko Perangkat Daerah	1 Dok	1 Dok	1 Dok	1 Dok	1 Dok	Dok

3.2 Strategi dan Arah Kebijakan Jangka Menengah Dinas Perikanan Kabupaten Bengkalis

Strategi dan kebijakan dalam Renstra OPD adalah strategi dan kebijakan OPD untuk mencapai tujuan dan sasaran jangka menengah OPD yang selaras dengan strategi dan kebijakan daerah serta rencana program prioritas dalam RPJMD. Strategi dan kebijakan jangka menengah OPD menunjukkan bagaimana cara OPD mencapai tujuan, sasaran jangka menengah OPD, dan target kinerja hasil (outcome) program prioritas RPJMD yang menjadi tugas dan fungsi OPD. Strategi dan kebijakan dalam Renstra OPD selanjutnya menjadi dasar perumusan kegiatan OPD bagi setiap program prioritas RPJMD yang menjadi tugas dan fungsi OPD.

Strategi dan arah kebijakan merupakan rumusan perencanaan komprehensif tentang bagaimana OPD mencapai tujuan dan sasaran dengan efektif dan efisien. Dengan pendekatan yang komprehensif, strategi juga dapat digunakan sebagai sarana untuk melakukan tranformasi, reformasi, dan perbaikan kinerja birokrasi. Perencanaan strategik tidak saja mengagendakan aktivitas pembangunan, tetapi juga segala program yang mendukung dan menciptakan layanan masyarakat tersebut dapat dilakukan dengan baik, termasuk di dalamnya upaya memperbaiki kinerja dan kapasitas birokrasi, sistem manajemen, dan pemanfaatan teknologi informasi.

Rumusan strategi merupakan pernyataan-pernyataan yang menjelaskan bagaimana tujuan dan sasaran akan dicapai serta selanjutnya dijabarkan dalam serangkaian kebijakan. Sedangkan Arah Kebijakan adalah pedoman yang wajib dipatuhi dalam melakukan tindakan untuk melaksanakan strategi yang dipilih, agar lebih terarah dalam mencapai tujuan dan sasaran melalui program dan kegiatan yang tepat.

Untuk mencapai tujuan dan sasaran, maka strategi dan arah kebijakan dalam Renstra Dinas Perikanan Kabupaten Bengkalis Tahun 2025-2029 adalah seperti pada Tabel 5.1 berikut ini :

Tabel 5.1

Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Kebijakan Renstra Dinas Perikanan Kabupaten Bengkalis
 Tahun 2025-2029

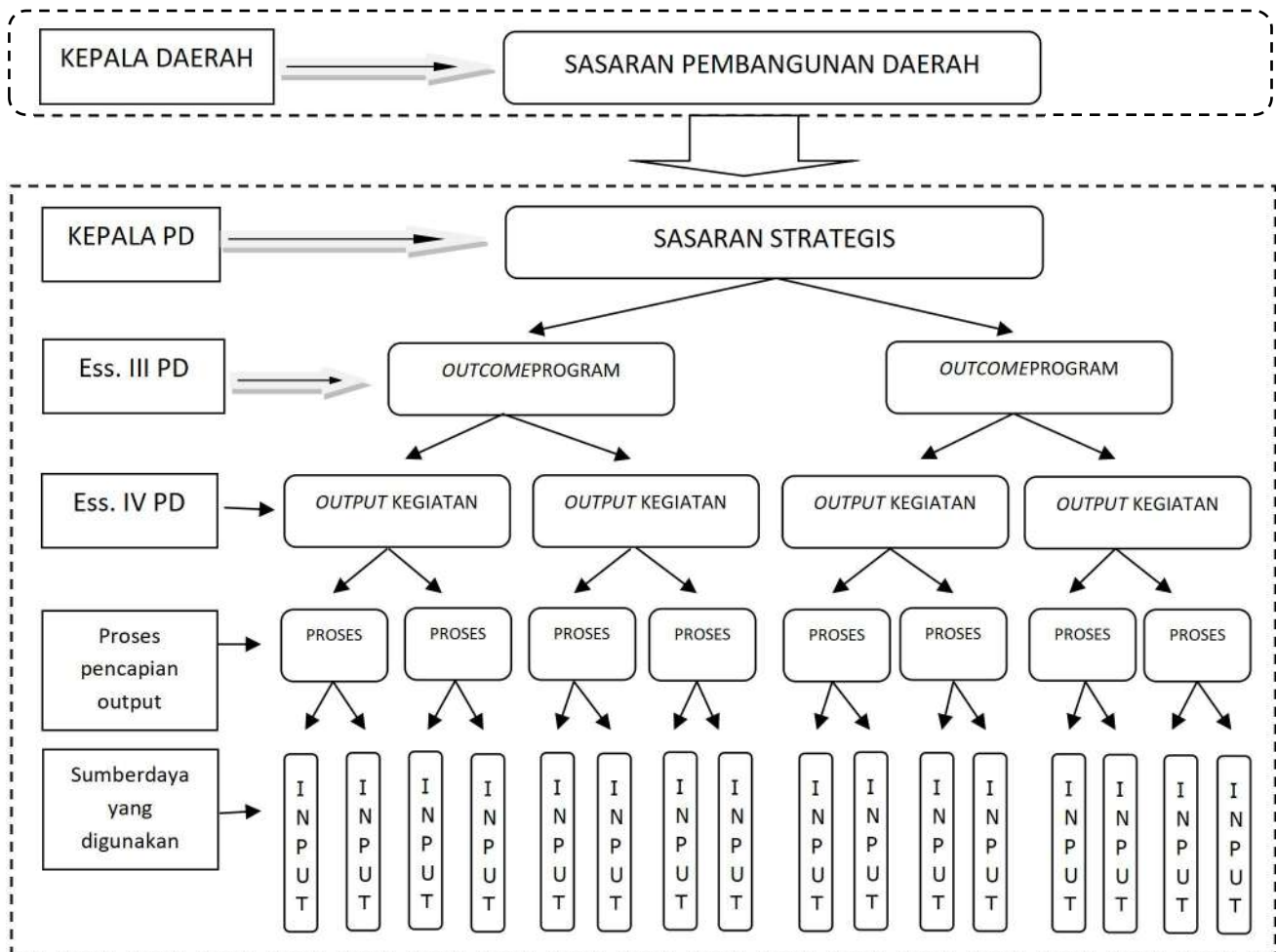
VISI	TERWUJUDNYA KABUPATEN BENGKALIS YANG BERMARWAH, MAJU DAN SEJAHTERA			
MISI (1)	Mewujudkan Pengelolaan Potensi Keuangan Daerah, Sumber Daya Alam dan Sumber Daya Manusia yang Efektif dalam Memajukan Perekonomian			
TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
Penguatan ekonomi petani dan nelayan	Meningkatnya produksi usaha perikanan	Jumlah produksi Perikanan	Peningkatan penerapan teknologi	Meningkatkan penerapan teknologi
			Peningkatan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana produksi Perikanan	Meningkatkan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana produksi Perikanan
	Meningkatnya tingkat konsumsi ikan	Angka konsumsi ikan	Peningkatan tingkat konsumsi ikan	Meningkatkan tingkat konsumsi ikan
	Pendapatan rata-rata nelayan	Jumlah Pendapatan rata-rata nelayan	Peningkatan produksi perikanan tangkap dan Perikanan Budidaya	- Pemenuhan Sarana dan Prasarana Perikanan Tangkap dan Perikanan Budidaya - Peningkatan Kapasitas Pelaku Usaha Perikanan
	Meningkatnya cakupan binaan kelompok pelaku usaha perikanan	Jumlah kelompok nelayan yang dibina	Peningkatan pembinaan kelembagaan dan SDM pelaku usaha Perikanan	Meningkatkan pembinaan kelembagaan dan SDM pelaku usaha Perikanan
			Pengoptimalan pengelolaan sumberdaya perikanan	Mengoptimalkan pengelolaan sumberdaya Perikanan

BAB IV

PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Untuk mencapai tujuan dan sasaran strategis perangkat daerah dalam rangka mewujudkan tujuan dan sasaran pembangunan daerah, harus ada kejelasan siapa yang bertanggung jawab terhadap pencapaian kinerja pada setiap tingkatan. Arsitektur kinerja dapat digambarkan dalam bentuk pohon kinerja sebagai berikut:

Gambar 6.1.
Arsitektur Kinerja Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah



Dari gambar di atas dapat dilihat bahwa pencapaian tujuan dan sasaran perangkat daerah menjadi tanggung jawab kepala perangkat daerah (eselon II). Sedangkan pencapaian

outcome suatu program menjadi tanggung jawab kepala bidang/kepala bagian (eselon III). Sementara untuk pencapaian output kegiatan menjadi tanggung jawab kepala subbidang/kepala subbagian. Adapun staf pelaksana bertanggung jawab terhadap teknis pelaksanaan kegiatan (input dan proses).

Rencana program dan kegiatan dalam Renstra Dinas Perikanan Kabupaten Bengkalis Tahun 2021-2026 merupakan penjabaran dari RPJMD Pemerintah Kabupaten Bengkalis yang terdiri dari program yang menunjang secara langsung pencapaian visi dan misi serta program prioritas dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah termasuk pemenuhan pelayanan dasar kepada masyarakat sesuai Standar Pelayanan Minimal (SPM). Program prioritas untuk mendukung pencapaian tujuan pembangunan bidang kelautan dan perikanan yang dilaksanakan oleh Dinas Perikanan Kabupaten Bengkalis. Adapun Program dan Kegiatan Dinas Perikanan Kabupaten Bengkalis yang sesuai dengan Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 dan Kepmendagri 050 – 3708 Tahun 2020 direncanakan pada periode Renstra tahun 2021-2026, berikut uraian Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan yang akan di laksanakan oleh Dinas Perikanan Kabupaten Bengkalis :

1. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA

1.1. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah, dengan sub kegiatan :

1.1.1. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah

1.1.2. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

1.1.3. Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

1.2. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah, dengan sub kegiatan :

1.2.1. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN

1.3. Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah, dengan sub kegiatan :

1.3.1. Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD

1.3.2. Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD

1.3.3. Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD

1.4. Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah, dengan sub kegiatan :

- 1.4.1. *Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya*
- 1.4.2. *Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan*

1.5. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah, dengan sub kegiatan :

- 1.5.1. *Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor*
- 1.5.2. *Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor*
- 1.5.3. *Penyediaan Peralatan Rumah Tangga*
- 1.5.4. *Penyediaan Bahan Logistik Kantor*
- 1.5.5. *Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan*
- 1.5.6. *Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan*
- 1.5.7. *Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD*
- 1.5.8. *Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD*
- 1.5.9. *Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD*

1.6. Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah, dengan sub kegiatan :

- 1.6.1. *Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan*
- 1.6.2. *Pengadaan Mebel*
- 1.6.3. *Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya*
- 1.6.4. *Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya*
- 1.6.5. *Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya*
- 1.6.6. *Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya*

1.7. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, dengan sub kegiatan :

- 1.7.1. *Penyediaan Jasa Surat Menyurat*
- 1.7.2. *Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik*
- 1.7.3. *Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor*
- 1.7.4. *Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor*

- 1.8. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, dengan sub kegiatan :

- 1.8.1. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan*
- 1.8.2. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan*
- 1.8.3. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya*
- 1.8.4. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya*
- 1.8.5. Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya*
- 1.8.6. Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya*

2. PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP

- 2.1. Kegiatan Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota, dengan sub kegiatan :

- 2.1.1. Penyediaan Data dan Informasi Sumber Daya Ikan*
- 2.1.2. Penyediaan Prasarana Usaha Perikanan Tangkap*
- 2.1.3. Penjaminan Ketersediaan Sarana Usaha Perikanan Tangkap*

- 2.2. Kegiatan Pemberdayaan Nelayan Kecil dalam Daerah Kabupaten/Kota, dengan sub kegiatan :

- 2.2.1. Pengembangan Kapasitas Nelayan Kecil*
- 2.2.2. Pelaksanaan Fasilitasi Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan Nelayan Kecil*
- 2.2.3. Pelaksanaan Fasilitasi Bantuan Pendanaan, Bantuan Pembiayaan, Kemitraan Usaha*

2.3. KegiatanPenerbitan Tanda Daftar Kapal Perikanan Berukuran sampai dengan 10 GT di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota, dengan sub kegiatan :

2.3.1. Penetapan Persyaratan dan Prosedur Penerbitan Tanda Daftar Kapal Perikanan Berukuran sampai dengan 10 GT

2.3.2. Pelayanan Penerbitan Tanda Daftar Kapal Perikanan Berukuran sampai dengan 10 GT

2.4. KegiatanPenerbitan Izin Pengadaan Kapal Penangkap Ikan dan Kapal Pengangkut Ikan dengan Ukuran sampai dengan 10 GT di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota, dengan sub kegiatan :

2.4.1. Penetapan Persyaratan dan Prosedur Penerbitan Persetujuan Pengadaan Kapal Penangkap Ikan dan Kapal Pengangkut Ikan dengan Ukuran sampai dengan 10 GT

2.4.2. Pelayanan Penerbitan Persetujuan Pengadaan Kapal Penangkap Ikan dan Kapal Pengangkut Ikan dengan Ukuran sampai dengan 10 GT

2.5. KegiatanPendaftaran Kapal Perikanan Berukuran Sampai Dengan 10 GT yang Beroperasi di Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota, dengan sub kegiatan :

2.5.1. Penetapan Persyaratan dan Prosedur Pendaftaran Kapal Perikanan dengan Ukuran sampai dengan 10 GT

2.5.2. Pelayanan Penerbitan Pendaftaran Kapal Perikanan dengan Ukuran sampai dengan 10 GT

3. PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA

3.1. KegiatanPenerbitan Izin Usaha Perikanan di Bidang Pembudidayaan Ikan yang Usahanya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota, dengan sub kegiatan :

3.1.1. Penetapan Persyaratan dan Prosedur Penerbitan Izin Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan yang Usahanya, Lokasi, dan/atau Manfaat atau Dampak Negatifnya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Menggunakan

Teknologi Sederhana, Semi Intensif, dan Intensif, serta tidak Menggunakan Modal Asing dan/atau Tenaga Kerja Asing

3.1.2. Pelayanan Penerbitan Izin Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan yang Usahanya, Lokasi, dan/atau Manfaat atau Dampak Negatifnya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Menggunakan Teknologi Sederhana, Semi Intensif, dan Intensif, serta Tidak Menggunakan Modal Asing dan/atau Tenaga Kerja Asing

3.2. KegiatanPemberdayaan Pembudi Daya Ikan Kecil, dengan sub kegiatan :

3.2.1. Pengembangan Kapasitas Pembudi Daya Ikan Kecil

3.2.2. Pelaksanaan Fasilitas Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan Pembudi Daya Ikan Kecil

3.2.3. Pelaksanaan Fasilitas Bantuan Pendanaan, Bantuan Pembiayaan, Kemitraan Usaha

3.2.4. Pemberian Pendampingan, Kemudahan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan

3.3. KegiatanPenerbitan Tanda Daftar bagi Pembudi Daya Ikan Kecil (TDPIK) dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota, dengan sub kegiatan :

3.3.1. Penetapan Persyaratan dan Prosedur Penerbitan Tanda Daftar bagi Pembudidayaan Ikan Kecil (TDPIK) dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota

3.3.2. Pelayanan Penerbitan Tanda Daftar bagi Pembudi Daya Ikan Kecil (TDPIK) dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota

3.4. KegiatanPengelolaan Pembudidayaan Ikan, dengan sub kegiatan :

3.4.1. Penyediaan Data dan Informasi Pembudidayaan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota

3.4.2. Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota

3.4.3. Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota

- 3.4.4. *Pengelolaan Kesehatan Ikan dan Lingkungan Budidaya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota*
- 3.4.5. *Pembinaan dan Pemantauan Pembudidayaan Ikan di Darat*
- 3.4.6. *Perencanaan, dan Pengembangan, Pemanfaatan lahan untuk Pembudidayaan Ikan di Darat*
- 3.4.7. *Perencanaan, dan Pengembangan Pemanfaatan Air untuk Pembudidayaan Ikan di Darat*

4. PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN

- 4.1. Kegiatan Penerbitan Tanda Daftar Usaha Pengolahan Hasil Perikanan Bagi Usaha Skala Mikro dan Kecil, dengan sub kegiatan :
 - 4.1.1. *Penyediaan Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota*
- 4.2. Kegiatan Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil, dengan sub kegiatan :
 - 4.2.1. *Pelaksanaan Bimbingan dan Penerapan Persyaratan atau Standar pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil*
- 4.3. Kegiatan Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota, dengan sub kegiatan :
 - 4.3.1. *Peningkatan Ketersediaan Ikan untuk Konsumsi dan Usaha Pengolahan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota*
 - 4.3.2. *Pemberian Fasilitas bagi Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota*

Penetapan Rencana Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif Dinas Perikanan Kabupaten Bengkalis Tahun 2026-2030 sebagaimana tertuang pada Tabel sebagai berikut :

Rancangan Akhir Renstra 2025-2029
Dinas Perikanan Kab. Bengkalis

TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN DAN SATUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN DAN SATUAN	URUSAN	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	OUTPUT/OUTPUT SUB KEGIATAN	INDIKATOR OUTPUT DAN SATUAN	BASE LINE 2024	TARGET 2025	TARGET OUTPUT DAN PAGU ANGGARAN PROGRAM RENSTRA PERANGKAT DAERAH PERIODE 2026 - 2030									
										2026		2027		2028		2029		2030	
1. Kontribusi PDRB Sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan (%)	- Nilai Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah - Persentase Partisipasi ASN																		
4.1. Meningkatkan dukungan pelayanan administrasi keuangan dan operasional	- Nilai Sakip Perangkat Daerah (%) - Persentase pemenuhan kebutuhan pelayanan						Angka	72	73	74		75		76		77		78	
				1. Urusan Pemerintahan Bidang Kelautan dan Perikanan	1. Mengembangkan Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Kota	Meningkatnya dukungan pelayanan administrasi keuangan dan operasional pelayanan administrasi keuangan dan	persentase Meningkatnya dukungan pelayanan administrasi keuangan dan	-	100,00	13.191.334.177,00		13.248.755.000,00		13.128.755.000,00		12.783.825.000,00		12.456.200.000,00	
					1.1. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Peningkatan Capaian Perencanaan	Persentase Peningkatan	100	100,00	100,00	500.000.000,00	100,00	300.000.000,00	100,00	300.000.000,00	100,00	240.000.000,00	100,00	240.000.000,00
					1.1.1. Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Tersedianya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan	2	2 dok	2 dok	200.000.000,00	1 dok	100.000.000,00	1 dok	100.000.000,00	1 dok	80.000.000,00	1 dok	80.000.000,00
					1.1.2. Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar	2	2 laporan	2 laporan	150.000.000,00	2 laporan	100.000.000,00	2 laporan	100.000.000,00	2 laporan	80.000.000,00	2 laporan	80.000.000,00
					1.2. Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tersedianya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1	1 laporan	1 laporan	150.000.000,00	1 laporan	100.000.000,00	1 laporan	100.000.000,00	1 laporan	80.000.000,00	1 laporan	80.000.000,00
					Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan gaji, tunjangan dan uraian	Persentase pemenuhan gaji, tunjangan dan uraian	100	100,00	100,00	8.500.000.000,00	100,00	9.500.000.000,00	100,00	9.500.000.000,00	100,00	9.500.000.000,00	100,00	9.500.000.000,00
					Sub Kegiatan Penyediaan Oaji dan Tunjangan ASN	Tersedianya Oaji dan Tunjangan ASN	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	49	49 orang	52 orang	8.500.000.000,00	60 orang	9.500.000.000,00	60 orang	9.500.000.000,00	60 orang	9.500.000.000,00	60 orang	9.500.000.000,00
					Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase pendataan dan penatausahaan barang	Persentase pendataan dan penatausahaan barang	100	100,00	100,00	603.200.000,00	100,00	503.200.000,00	100,00	503.200.000,00	100,00	503.200.000,00	100,00	503.200.000,00
					Sub Kegiatan Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Tersedianya Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	1	1 dok	1 dok	403.200.000,00	1 dok	403.200.000,00	1 dok	403.200.000,00	1 dok	403.200.000,00	1 dok	403.200.000,00
					Sub Kegiatan Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	Tersedianya Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah laporan hasil penilaian Barang Milik Daerah SKPD	-	1 laporan	1 laporan	100.000.000,00	1 laporan	50.000.000,00	1 laporan	50.000.000,00	1 laporan	50.000.000,00	1 laporan	50.000.000,00
					Sub Kegiatan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Tersedianya Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah laporan penatausahaan barang milik Daerah pada SKPD	1	1 laporan	1 laporan	100.000.000,00	1 laporan	50.000.000,00	1 laporan	50.000.000,00	1 laporan	50.000.000,00	1 laporan	50.000.000,00
					Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase peningkatan	Persentase peningkatan	100	100,00	100,00	189.930.000,00	100,00	139.930.000,00	100,00	139.930.000,00	100,00	125.000.000,00	100,00	125.000.000,00
					Sub Kegiatan Pengadaan Pakan Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Tersedianya Pakan Dinas beserta atribut kelengkapannya	Jumlah paket pakan dinas beserta atribut kelengkapannya	-	1 paket	1 paket	100.000.000,00	1 paket	50.000.000,00	1 paket	50.000.000,00	1 paket	50.000.000,00	1 paket	50.000.000,00
					Sub Kegiatan Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	Tersedianya Bimbingan Teknis implementasi Peraturan Perundang-undangan	Jumlah orang yang mengikuti Bimbingan Teknis implementasi Peraturan Perundang-undangan	10	10 orang	10 orang	89.930.000,00	10 orang	89.930.000,00	10 orang	89.930.000,00	8 orang	75.000.000,00	8 orang	75.000.000,00
					Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase terlaksananya pemenuhan dan penatausahaan	Persentase terlaksananya pemenuhan dan penatausahaan	100	100,00	100,00	1.215.939.005,00	100,00	1.025.625.000,00	100,00	985.625.000,00	100,00	885.625.000,00	100,00	758.000.000,00
					Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan	2	2 paket	2 paket	40.625.005,00	2 paket	40.625.000,00	2 paket	40.625.000,00	2 paket	40.625.000,00	2 paket	41.000.000,00
					Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah paket peralatan dan perlengkapan	2	2 paket	2 paket	180.000.000,00	2 paket	90.000.000,00	2 paket	90.000.000,00	2 paket	90.000.000,00	2 paket	90.000.000,00
					Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah paket bahan logistik kantor	2	2 paket	2 paket	150.000.000,00	2 paket	100.000.000,00	2 paket	100.000.000,00	2 paket	100.000.000,00	2 paket	100.000.000,00
					Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah paket barang cetak dan penggandaan	3	3 paket	3 paket	70.314.000,00	3 paket	60.000.000,00	3 paket	60.000.000,00	3 paket	60.000.000,00	3 paket	30.000.000,00
					Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	35	35 dok	35 dok	45.000.000,00	35 dok	45.000.000,00	35 dok	45.000.000,00	35 dok	45.000.000,00	35 dok	45.000.000,00
					Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Tersedianya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	2	2 laporan	2 laporan	530.000.000,00	2 laporan	540.000.000,00	2 laporan	500.000.000,00	2 laporan	400.000.000,00	2 laporan	302.000.000,00
					Sub Kegiatan Penatausahaan Arap Dinamis pada SKPD	Tersedianya Penatausahaan Arap Dinamis pada SKPD	Jumlah dokumen penatausahaan arap dinamis pada SKPD	-	1 dok	1 dok	100.000.000,00	1 dok	50.000.000,00	1 dok	50.000.000,00	1 dok	50.000.000,00	1 dok	50.000.000,00
					Sub Kegiatan Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Tersedianya Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah dukungan pelaksanaan sistem pemerintahan berbasis elektronik pada SKPD	2	2 dok	2 dok	100.000.000,00	2 dok	100.000.000,00	2 dok	100.000.000,00	2 dok	100.000.000,00	2 dok	100.000.000,00
					Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase pengadaan barang milik perangkat	Persentase pengadaan barang milik perangkat	100	100,00	100,00	350.000.000,00	100,00	200.000.000,00	100,00	200.000.000,00	100,00	200.000.000,00	100,00	150.000.000,00
					Sub Kegiatan Pengadaan Mebel	Tersedianya Mebel	Jumlah paket mebel yang disediakan	-	1 unit	2 unit	50.000.000,00	5 unit	50.000.000,00	5 unit	50.000.000,00	5 unit	50.000.000,00	5 unit	50.000.000,00

Rancangan Akhir Renstra 2025-2029
Dinas Perikanan Kab. Bengkalis

					Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	TersedianyaPeralatanMesin Lainnya	Jumlah unit peralatan dan mesin lainnya yang akan disediakan	5	10 unit	10 unit	200.000.000,00	10 unit	50.000.000,00	10 unit	50.000.000,00	10 unit	50.000.000,00	10 unit	50.000.000,00	
					Sub Kegiatan Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	TersedianyaGedung Kantoratau Bangunan Lainnya	Jumlah unit gedung kantor atau bangunan lainnya	-	1 unit	1 unit	100.000.000,00	1 unit	100.000.000,00	1 unit	100.000.000,00	1 unit	100.000.000,00	1 unit	100.000.000,00	
					Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase terpenuhinya jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	Persentase terpenuhinya jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	100	100,00	100,00	580.098.310,00	100,00	580.000.000,00	100,00	580.000.000,00	100,00	580.000.000,00	100,00	580.000.000,00	
					Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	TersedianyaJasasurat menyurat	Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat	1	1 laporan	1 laporan	77.100.000,00	1 laporan	80.000.000,00	1 laporan	80.000.000,00	1 laporan	80.000.000,00	1 laporan	80.000.000,00	
					Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	TersedianyaJasakomunikasi, sumber daya air dan listrik	Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi	3	3 laporan	3 laporan	377.998.310,00	3 laporan	400.000.000,00	3 laporan	400.000.000,00	3 laporan	400.000.000,00	3 laporan	400.000.000,00	
					Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	TersedianyaJasaperalatan dan perlengkapan kantor	Jumlah laporan penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	2	2 laporan	2 laporan	75.000.000,00	2 laporan	50.000.000,00	2 laporan	50.000.000,00	2 laporan	50.000.000,00	2 laporan	50.000.000,00	
					Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	TersedianyaJasapelayanan umum kantor	Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum	2	2 laporan	2 laporan	50.000.000,00	2 laporan	50.000.000,00	2 laporan	50.000.000,00	2 laporan	50.000.000,00	2 laporan	50.000.000,00	
					Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase terlaksananya pemeliharaan barang milik daerah	Persentase terlaksananya pemeliharaan barang milik daerah	100	100,00	100,00	1.252.168.862,00	100,00	1.000.000.000,00	100,00	920.000.000,00	100,00	750.000.000,00	100,00	650.000.000,00	
					Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan, Pengangkutan, Pengadaan, dan Perawatan Kendaraan, Pajal, dan Perawatan Kendaraan, Dinas	TersedianyaJasapemeliharaan, biaya pemeliharaan dan pajak kendaraan, pengangkutan, pengadaan, dan perawatan kendaraan, dinas	Jumlah kendaraan dinas operasional	5	5 unit	5 unit	200.000.000,00	5 unit	100.000.000,00	5 unit	100.000.000,00	5 unit	100.000.000,00	5 unit	100.000.000,00	
					Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	TersedianyaPeralatanMesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dielihara	4	4 unit	4 unit	150.000.000,00	4 unit	100.000.000,00	4 unit	100.000.000,00	4 unit	100.000.000,00	4 unit	100.000.000,00	
					Sub Kegiatan Pemeliharaan Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	TersedianyaRehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya	Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang akan direhabilitasi	6	10 unit	10 unit	100.000.000,00	10 unit	100.000.000,00	10 unit	100.000.000,00	10 unit	100.000.000,00	10 unit	100.000.000,00	
					Sub Kegiatan Pemeliharaan Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	TersedianyaRehabilitasi sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya	Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang akan direhabilitasi	7	7 unit	7 unit	401.083.431,00	7 unit	350.000.000,00	7 unit	350.000.000,00	7 unit	350.000.000,00	7 unit	300.000.000,00	
					Sub Kegiatan Pemeliharaan Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	TersedianyaRehabilitasi sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya	Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang akan direhabilitasi	-	7 unit	7 unit	401.083.431,00	7 unit	350.000.000,00	7 unit	270.000.000,00	7 unit	100.000.000,00	7 unit	50.000.000,00	
					Meningkatnya produksi perikanan tangkap	Jumlah produksi perikanan tangkap (Ton)	Angka	4.328	5558	6788		7018		8018		9248		9018		
					2. Urusan Pemerintahan Bidang Kelautan dan Perikanan															
					2.1. Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Perairan Airlaut lainnya dan	peningkatan produksi perikanan tangkap	Persentase peningkatan	94	94,23		3.185.000.000,00		3.467.000.000,00		3.475.000.000,00		3.629.000.000,00		3.871.500.000,00	
					2.1.1. Penyediaan Data dan Informasi Sumber Daya Ikan	Penyediaan data dan informasi sumber daya ikan	Persentase terpenuhinya sarana dan prasarana penangkapan ikan	94	94,23	85,63%	1.885.000.000,00	87,62%	1.667.000.000,00	89,51%	1.675.000.000,00	92,83%	1.629.000.000,00	94,23%	1.871.500.000,00	
					2.1.1.1. Penyediaan Sarana Usaha Perikanan Tangkap	Penyediaan sarana usaha perikanan tangkap	TersedianyaDatalaInformasi Sumber Daya Ikan	1	1 Dok	1 Dok	785.000.000,00	1 Dok	667.000.000,00	1 Dok	675.000.000,00	1 Dok	629.000.000,00	1 Dok	871.500.000,00	
					2.1.1.2. Penyediaan Sarana Usaha Perikanan Tangkap	Penyediaan sarana usaha perikanan tangkap	TersedianyaSaranaUsaha Perikanan Tangkap	3	1 unit	2 unit	550.000.000,00	2 unit	500.000.000,00	2 unit	500.000.000,00	2 unit	500.000.000,00	2 unit	500.000.000,00	
					2.1.1.3. Penyediaan Sarana Usaha Perikanan Tangkap	Penyediaan sarana usaha perikanan tangkap	TersedianyaSaranaUsaha Perikanan Tangkap	-	1 unit	2 unit	550.000.000,00	2 unit	500.000.000,00	2 unit	500.000.000,00	2 unit	500.000.000,00	2 unit	500.000.000,00	
					2.1.1.4. Pengembangan Kapasitas Nelayan Kecil dalam Daerah Kabupaten/Kota	Pengembangan kapasitas nelayan kecil	Persentase peningkatan	94	94,23	85,63%	1.300.000.000,00	87,62%	1.800.000.000,00	89,51%	1.800.000.000,00	92,83%	2.000.000.000,00	94,23%	2.000.000.000,00	
					2.1.1.5. Pengembangan Kapasitas Nelayan Kecil	Pengembangan kapasitas nelayan kecil	Persentase peningkatan	60	20 orang	40 orang	150.000.000,00	40 orang	150.000.000,00	40 orang	150.000.000,00	40 orang	150.000.000,00	40 orang	150.000.000,00	
					2.1.1.6. Pelaksanaan Fasilitas Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan Nelayan Kecil	Pelaksanaan fasilitas pembentukan dan pengembangan kelembagaan nelayan kecil	Persentase peningkatan	15	5 kelompok	5 kelompok	150.000.000,00	5 kelompok	150.000.000,00	5 kelompok	150.000.000,00	5 kelompok	150.000.000,00	5 kelompok	150.000.000,00	
					2.1.1.7. Penyediaan Sarana dan Prasarana Pemberdayaan Usaha Nelayan Stala	Penyediaan sarana dan prasarana pemberdayaan usaha nelayan stala	Persentase peningkatan	2	500 unit	500 unit	1.000.000.000,00	550 unit	1.500.000.000,00	600 unit	1.500.000.000,00	700 unit	1.700.000.000,00	700 unit	1.700.000.000,00	
					Meningkatnya produksi perikanan budidaya	Jumlah produksi perikanan budidaya (Ton)	Angka	2.350	3570	4790		5790		6010		7230		8450		
					2. Urusan Pemerintahan Bidang Kelautan dan Perikanan															
					2.1. Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan Kecil	peningkatan produksi perikanan budidaya	Persentase peningkatan	83	82,50	-	5.823.000.000,00	1,80	5.885.000.000,00	1,92	6.282.000.000,00	1,98	6.610.000.000,00	2,00	6.943.600.000,00	
					2.1.1. Pengembangan Kapasitas Pembudi Daya Ikan Kecil	Pengembangan kapasitas pembudidaya ikan kecil	Persentase peningkatan	83	82,50	83,33%	1.150.000.000,00	90%	1.435.000.000,00	95,88%	1.382.000.000,00	98,75%	1.560.000.000,00	100%	1.743.600.000,00	
					2.1.1.1. Pemberian Pendampingan, Kemudahan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Inovasi, serta Bantuan Sarana	Pemberian pendampingan, kemudahan akses ilmu pengetahuan, teknologi dan inovasi, serta bantuan sarana	Persentase peningkatan	10	0 kelompok	2 kelompok	350.000.000,00	4 kelompok	585.000.000,00	6 kelompok	482.000.000,00	8 kelompok	610.000.000,00	10 kelompok	743.600.000,00	
					2.1.1.2. Pemberian Pendampingan, Kemudahan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Inovasi, serta Bantuan Sarana	Pemberian pendampingan, kemudahan akses ilmu pengetahuan, teknologi dan inovasi, serta bantuan sarana	Persentase peningkatan	-	3 kelompok	kelompok	800.000.000,00	7 kelompok	850.000.000,00	3 kelompok	900.000.000,00	3 kelompok	950.000.000,00	0 kelompok	1.000.000.000,00	
					2.1.1.3. Pengelolaan Pembudidayaan Ikan	Pengelolaan pembudidayaan ikan	Persentase peningkatan	83	82,50	83,33%	4.673.000.000,00	90%	4.450.000.000,00	95,88%	4.900.000.000,00	98,75%	5.050.000.000,00	100%	5.200.000.000,00	
					2.1.1.4. Penyediaan Data dan Informasi Pembudidayaan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Penyediaan data dan informasi pembudidayaan ikan dalam 1 (satu) daerah kabupaten/kota	TersedianyaDatalaInformasi Pembudidayaan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	1	1 dok	1 dok	373.000.000,00	1 dok	350.000.000,00	1 dok	350.000.000,00	1 dok	350.000.000,00	1 dok	350.000.000,00	
					2.1.1.5. Penyediaan Sarana dan Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Penyediaan sarana dan prasarana pembudidayaan ikan dalam 1 (satu) daerah kabupaten/kota	TersedianyaSaranaPrasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	-	5 unit	6 unit	500.000.000,00	7 unit	500.000.000,00	8 unit	400.000.000,00	9 unit	400.000.000,00	10 unit	400.000.000,00	
					2.1.1.6. Pengelolaan Kesehatan Ikan dan Lingkungan Budidaya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan kesehatan ikan dan lingkungan budidaya dalam 1 (satu) daerah kabupaten/kota	TersedianyaKesehatan Ikan dan Lingkungan Budidaya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	1	1 dok	1 dok	450.000.000,00	1 dok	400.000.000,00	1 dok	400.000.000,00	1 dok	400.000.000,00	1 dok	400.000.000,00	
					2.1.1.7. Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Penjaminan ketersediaan sarana pembudidayaan ikan dalam 1 (satu) daerah kabupaten/kota	TersedianyaSarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	15	15 unit	16 unit	2.400.000.000,00	17 unit	2.000.000.000,00	18 unit	2.500.000.000,00	19 unit	2.500.000.000,00	20 unit	2.500.000.000,00	

Rancangan Akhir Renstra 2025-2029
Dinas Perikanan Kab. Bengkalis

					Pembinaan dan Pemantauan Pembudidayaan Ikan di Darat	TerdinnyaPembudidayaan ikan di Darat	Jumlah pembudidayaan yang mencakup	-	10 unit	11 unit	150.000.000,00	12 unit	300.000.000,00	13 unit	250.000.000,00	14 unit	300.000.000,00	15 unit	350.000.000,00	
					PerencanaanPembangunanPemanfaatan danPeningkatanLahanuntukPembudidayaan Ikan di Darat	TersedianyaLahanuntukPembudidayaan Ikan di Darat	Lusi lahan untuk pembudidayaan ikan di darat yang	-	1 unit	2 unit	300.000.000,00	3 unit	350.000.000,00	4 unit	400.000.000,00	5 unit	450.000.000,00	6 unit	500.000.000,00	
					Perencanaan, dan Pengembangan Pemanfaatan Air untuk Pembudidayaan	TersedianyaPemanfaatan air untukPembudidayaan	Jumlah pembudidayaan	-	1 dok	1 dok	500.000.000,00	1 dok	550.000.000,00	1 dok	600.000.000,00	1 dok	650.000.000,00	1 dok	700.000.000,00	
		Meningkatnya produksi perikanan tangkap	Jumlah produksi perikanan tangkap (Ton)				Angka	4.328	5558	6788		7018		8018		9248		9018		
				2. Urusan Pemerintahan Bidang Kelautan dan Perikanan	2. PROPOSAL PENGAWASAN BUKTAN DAKAP, KELAUTAN DAN PERIKANAN	peningkatan produksi perikanan tangkap	Persentase peningkatan	82	82,00	-	114.478.771,00	-	-	-	-	-	-	-	-	
					2.1. Pengawasan Sumber Daya Perikanan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Perikanan Air Tawar	pengawasan sumber daya perikanan	Persentase terlaksananya	82	82,00	85,00%	114.478.771,00	-	-	-	-	-	-	-	-	
					2.1.1. Operasi Kapal Pengawas Perikanan	Operasi Kapal Pengawas Perikanan	Jumlah hari operasi Kapal Pengawas	1	1 Hari operasi	Hari operasi	114.478.771,00	-	-	-	-	-	-	-	-	
		Meningkatnya konsumsi ikan oleh masyarakat	Angka Konsumsi Ikan (Kg/KAP/Thn)				Angka	42,94	43,2	43,46		43,72		43,96		44,24		44,5		
				2. Urusan Pemerintahan Bidang Kelautan dan Perikanan	2. PENGARAH PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	tingkat konsumsi ikan	Persentase tingkat konsumsi ikan	98	98,18		1.473.000.000,00		1.432.500.000,00		1.479.000.000,00		1.512.000.000,00		1.548.000.000,00	
					2.1. Penerbitan Tanda Daftar Usaha Pengolahan Hasil Perikanan Bagi Usaha Skala Mikro dan Kecil	terlaksananya penerbitan tanda daftar usaha	Persentase terlaksananya	98	98,18	100,00	153.000.000,00	100,00	122.500.000,00	100,00	159.000.000,00	100,00	192.000.000,00	100,00	228.000.000,00	
					2.1.1. Penyediaan Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan dalam 1 (satu) Tahun	Tersedianya Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan	Tersedianya data dan informasi	1	1 dok	1 dok	153.000.000,00	1 dok	122.500.000,00	1 dok	159.000.000,00	1 dok	192.000.000,00	1 dok	228.000.000,00	
					2.1.1.1. Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil	terlaksananya bimbingan mutu dan keamanan hasil	Persentase terlaksananya	98	98,18	100,00	400.000.000,00	100,00	400.000.000,00	100,00	400.000.000,00	100,00	400.000.000,00	100,00	400.000.000,00	
					2.1.1.1.1. Pembinaan terhadap Penerapan Persyaratan Perizinan Berusaha Pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan	Terlaksananya penerbitan dan Persyaratan Perizinan Berusaha	Jumlah Unit Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil	3	3 Unit Usaha	3 Unit Usaha	400.000.000,00	3 Unit Usaha	400.000.000,00	3 Unit Usaha	400.000.000,00	3 Unit Usaha	400.000.000,00	3 Unit Usaha	400.000.000,00	
					2.1.1.1.2. Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan dalam 1 (satu) Tahun	peningkatan angka konsumsi ikan dan keamanan hasil	Persentase peningkatan angka konsumsi ikan dan keamanan hasil	98	98,18	100,00	920.000.000,00	100,00	910.000.000,00	100,00	920.000.000,00	100,00	920.000.000,00	100,00	920.000.000,00	
					2.1.1.1.3. Peningkatan Keterampilan dan Ketersediaan Ikan untuk Konsumsi dan Usaha Pengolahan dalam 1 (satu) Tahun	peningkatan produksi ikan dan ketersediaan ikan	Jumlah produksi ikan dan ketersediaan ikan	1.000	1000 ton	1000 ton	610.000.000,00	1000 ton	600.000.000,00	1000 ton	610.000.000,00	1000 ton	610.000.000,00	1000 ton	610.000.000,00	
					3. Pemberian Fasilitas bagi Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 Tahun	Tersedianya Fasilitas bagi Pelaku Usaha Perikanan	Jumlah pelaku usaha perikanan	5	5 Pelaku Usaha	5 Pelaku Usaha	310.000.000,00	5 Pelaku Usaha	310.000.000,00	5 Pelaku Usaha	310.000.000,00	5 Pelaku Usaha	310.000.000,00	5 Pelaku Usaha	310.000.000,00	
TOTAL PAGU RENSTRA											23.786.812.948,00		24.033.255.000,00		24.364.755.000,00		24.534.825.000,00		24.819.300.000,00	
TOTAL PAGU RANKHIR RPJMD (hasil input OPD pada sipd renstra)											23.797.989.887,00		24.034.713.245,00		24.366.889.138,00		24.535.522.474,00		24.820.607.118,00	

Indikator kinerja adalah ukuran keberhasilan yang dicapai pada setiap unit kerja. Indikator kinerja atau indikator keberhasilan untuk setiap jenis pelayanan pada bidang-bidang kewenangan yang diselenggarakan oleh unit organisasi perangkat daerah dalam bentuk standar pelayanan yang ditetapkan oleh masing-masing daerah. Penetapan standar pelayanan merupakan cara untuk menjamin dan meningkatkan akuntabilitas pelayanan pemerintah daerah kepada masyarakat.

Indikator kinerja adalah ukuran kuantitatif dan atau kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu sasaran atau tujuan yang telah ditetapkan. Indikator kinerja harus merupakan sesuatu yang akan dihitung dan diukur serta digunakan sebagai dasar untuk menilai atau melihat tingkatan kinerja baik dalam tahap perencanaan (*ex ante*), tahap pelaksanaan (*on going*), maupun tahap setelah kegiatan selesai dan berfungsi (*ex post*).

Kinerja penyelenggaraan urusan Perikanan di Kabupaten Bengkalis yang disajikan berupa target kinerja penyelenggaraan urusan Perikanan selama periode 2021-2026 sebagaimana periode RPJMD dan Renstra Perangkat Daerah 2021-2026. Indikator kinerja terdiri atas indikator dampak (*impact*) yang menggambarkan capaian dari tujuan dan sasaran perangkat daerah, serta indikator kinerja hasil (*outcome*) untuk menggambarkan capaian kinerja dari implementasi program perangkat daerah Dinas Perikanan Kabupaten Bengkalis selama periode rencana.

Indikator kinerja dampak (*impact*) yang menggambarkan capaian tujuan dan sasaran perangkat daerah sejatinya akan menjadi indikator kinerja utama (IKU) perangkat daerah yang dipertanggungjawabkan oleh kepala Dinas Perikanan Kabupaten Bengkalis dalam mendukung pencapaian IKU Bupati dan Wakil Bupati selama periode yang sama. Sedangkan indikator kinerja hasil (*outcome*) yang menggambarkan capaian dari implementasi program perangkat daerah Dinas Perikanan dijadikan sebagai indikator kinerja kunci (IKK) yang akan menjadi bagian dari kinerja yang harus dipertanggungjawabkan para pejabat eselon III lingkup Dinas Perikanan untuk mendukung pencapaian IKU perangkat daerah.

Indikator ini akan menggambarkan pengelolaan perikanan yang semakin membaik dari tahun ke tahun. Sehingga pada saat yang sama tergambar bahwa terjadi peningkatan kualitas kinerja pelayanan perikanan yang semakin baik. Selengkapnya target-target capaian kinerja Dinas Perikanan Kabupaten Bengkalis untuk periode 2025-2030 yang akan datang disajikan pada tabel 7.1. berikut ini:

Tabel 4.1

Indikator Kinerja Dinas Perikanan Kabupaten Bengkalis yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD

NO.	INDIKATOR	SATUAN	TARGET TAHUN						KET.
			2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
	-Nilai Sakip Perangkat Daerah (%) - Persentase pemenuhan	%	73	74	75	76	77	78	
	Jumlah produksi perikanan tangkap	Ton	5558	6788	7018	8018	9248	9018	
	Jumlah produksi perikanan Budidaya	Ton	3570	4790	5790	6010	7230	8450	
	Angka Konsumsi Ikan (Kg/KAP/Thn)	Kg/KAP/Thn	43,2	43,46	43,72	43,96	44,24	44,5	

BAB V

PENUTUP

8.1. Kesimpulan

Rencana Strategis Dinas Perikanan Kabupaten Bengkalis Tahun 2021- 2026 merupakan penjabaran visi dan misi serta kebijakan lainnya dalam RPJMD Kabupaten Bengkalis tahun 2021-2026. Renstra ini sebagai acuan bagi pelaksanaan kebijakan dan program serta kegiatan yang akan dilakukan oleh Dinas Perikanan Kabupaten Bengkalis dalam 5 (lima) tahun ke depan. Renstra ini memuat Tujuan, Sasaran, Strategi, Arah Kebijakan, Program dan Kegiatan serta kerangka pendanaan berikut unit kerja penanggung jawab dan lokasi kegiatan dalam pelaksanaan pembangunan Kabupaten Bengkalis.

Renstra disusun melalui tahapan-tahapan yang ditetapkan dalam peraturan perundangan, untuk memberikan arah yang jelas dalam melaksanakan kegiatan sesuai tugas, fungsi dan peran Dinas Perikanan sekaligus sebagai rambu-rambu strategis untuk mengukur kinerja tahunan Daerah berupa Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP). Selanjutnya, Renstra ini segera diimplementasi dan dicermati akuntabilitasnya agar sesuai dengan parameter pencapaian sasaran yang telah ditetapkan.

Sesuai dengan perkembangan lingkungan internal dan eksternal yang terus mengalami perubahan, maka Renstra Dinas Perikanan tidak bersifat kaku dan senantiasa harus memperhatikan perubahan-perubahan yang terjadi berdasarkan hasil pengendalian dan evaluasi. Dalam rangka peningkatan kapasitas, kerjasama dan loyalitas dalam pelaksanaan tugas sesuai dengan wewenang yang diberikan, maka komitmen dari semua aparatur dalam pelaksanaannya sangat diharapkan.

Tujuan dan sasaran, maupun program/kegiatan/sub kegiatan dalam Renstra ini, tidak boleh menjadi sekumpulan niat baik saja. Oleh karena itu penting bagi Dinas Perikanan untuk mengedepankan, tidak saja aspek perencanaannya, tetapi juga bagaimana fungsi pengendalian dan evaluasi digunakan secara tepat guna mengoordinasikan setiap elemen Perangkat Daerah untuk secara bersama-sama mencapai sasaran RPJMD yang pada dasarnya adalah untuk mensejahterakan masyarakat.

8.2. Kaidah Pelaksanaan

Renstra Dinas Perikanan Kabupaten Bengkalis Tahun 2021-2026 disusun melalui berbagai tahapan yakni persiapan, penyusunan rancangan, penyusunan rancangan akhir dan diakhiri dengan penetapan setelah RPJMD ditetapkan dengan Peraturan Daerah. Tujuannya adalah untuk menyelaraskan tujuan, strategi, kebijakan, program pembangunan daerah sesuai dengan tugas dan fungsi PD yang ditetapkan dalam RPJMD.

Rancangan akhir Renstra Perangkat Daerah telah diverifikasi oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bengkalis dalam rangka penyelarasan akhir dengan RPJMD dan telah diajukan kepada kepala daerah guna memperoleh penetapan. Berdasarkan Peraturan Kepala Daerah tentang Penetapan Renstra Perangkat Daerah, Dinas Perikanan melaksanakan Renstra menjadi pedoman unit kerja di lingkungan Perangkat Daerah dalam menyusun rancangan Renja setiap tahun.

Atas dasar itulah, beberapa hal yang perlu menjadi perhatian sebagai kaidah pelaksanaan Renstra Dinas Perikanan adalah sebagai berikut:

1. Renstra Dinas Perikanan akan diimplementasikan dengan konsisten dengan mematuhi asas-asas pemerintahan umum yang berlaku;
2. Pelaksanaan Renstra Perikanan Daerah ini merupakan tanggung jawab penuh dari Kepala Dinas Perikanan, dimana bersama dengan Kepala Bappeda, Dinas Perhubungan melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan Renstra ini.
3. Evaluasi pencapaian sasaran Renstra Dinas Perikanan dilakukan sekurangkurangnya sekali dalam lima tahun;
4. Pelaksanaan Renstra Dinas Perikanan dilakukan melalui Renja Dinas Perikanan setiap tahun dan realisasinya melalui DPA Dinas Perikanan setiap tahun;
5. Pengendalian dan evaluasi hasil Renja Dinas Perikanan tiap tahun melalui evaluasi hasil pelaksanaan DPA per triwulan merupakan bagian integral dari pengendalian dan evaluasi hasil RKPD dan digunakan juga untuk menyusun LAKIP sekaligus dijadikan sebagai instrumen untuk mengendalikan dan mengevaluasi efektivitas strategi dan kebijakan Renstra Dinas Perikanan dalam mencapai sasaran Renstra;
6. Dalam hal hasil pengendalian dan evaluasi terhadap Renstra dan Renja Dinas Perikanan diperlukan adanya perbaikan atau revisi Renstra maka perbaikan tersebut dapat dituangkan pada Renja tahun rencana atau dilakukan revisi Renstra jika pada kesempatan yang sama

RPJMD Kabupaten Bengkalis dilakukan revisi oleh alasan yang dibenarkan menurut peraturan-perundangan;

7. Dalam pelaksanaannya, Renstra ini harus mampu mendorong keterlibatan stakeholder pembangunan.